

**RELASI KUASA ANTARA KIAI DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL
ULUM SAKATIGA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelas Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Mei Wisnu

1544300021

PRODI POLITIK ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2018

**RELASI KUASA ANTARA KIAI DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL
ULUM SAKATIGA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelas Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Mei Wisnu

1544300021

PRODI POLITIK ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2018

SKRIPSI

**Relasi Kuasa Antara Kiai Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga
Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir Sumatera Selatan.**

disusun dan dipersiapkan oleh :

MEI WISNU

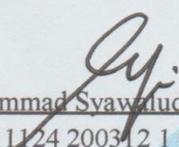
NIM. 1544300021

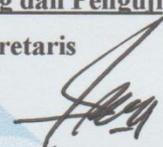
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Januari 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

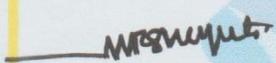
Sekretaris

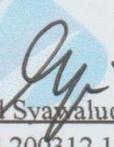

Dr. Mohammad Syawaluddin, M. Ag
NIP.19711124 200312 1 001


Sholeh Khudin, M. Hum
NIP. 19741025 200312 1 003

Pembimbing I

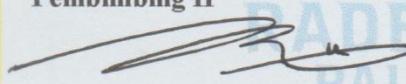
Penguji I

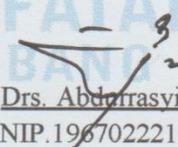

Prof. Dr. H.J. Suyuthi Pulungan, M. A
NIP.195607131985031001


Dr. Mohammad Syawaluddin, M. Ag
NIP.19711124 200312 1 001

Pembimbing II

Penguji II


Ryllian Chandra, M. A


Drs. Abdurasyid, M. Ag
NIP.196702221994031003

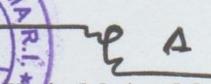
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 12 Februari 2018

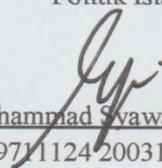
Dekan

Ketua Program Studi

Fakultas Adab dan Humaniora

Politik Islam


Dr. Nur Ikuda, M. Ag., M. A
01114 200003 1 002


Dr. Mohammad Syawaluddin, M. Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

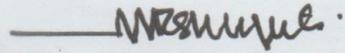


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Mei Wisnu Nim 1544300021,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Palembang, 30-01-2018

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H.J. Suyuthi Pulungan, M.A

NIP: 195607131985031001

Dosen Pembimbing II



Ryllian Chandra, M.A

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Mei Wisnu

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“RELASI KUASA ANTARA KIAI DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL
ULUM SAKATIGA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN”**

Yang ditulis oleh:

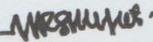
Nama : Mei Wisnu
NIM : 1544300021
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos Jurusan Politik Islam

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Palembang, 30 - 01 2018

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A

NIP: 195607131985031001

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Mei Wisnu

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“RELASI KUASA ANTARA KIAI DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL
ULUM SAKATIGA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mei Wisnu
NIM : 1544300021
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos Jurusan Politik Islam

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Palembang, 30 - 01 2018

Pembimbing II,



Ryllian Chandra, M.A

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 30-01 2018



Mei Wisnu

Nim. 1544300021

Motto:

**AKU ADALAH ORANG SUKSES, KARENA AKU
PERCAYA BAHWA AKU TERLAHIR SEBAGAI SANG
JUARA, TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN DI DUNIA
INI, SELAMA KITA YAKIN BAHWA KITA AKAN
SELALU BISA KARENA IZIN ALLAH SWT. TIDAK BISA,
HARUS BISA, KARENA KITA LUAR BIASA.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayah Sukiman dan ibu Saila yang telah merawat dan membesarkan saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini, serta memberikan doa, kasih sayang dan semangat yang tiada henti-hentinya
2. Saudara laki-laki saya wasisno dan istrinya dwi listiani S.pd yang senantiasa
3. Saudara perempuan saya Nislin Asmiarti, semoga tetap mennjadi kebanggan untuk keluarga.
4. Keponakan saya, Muhammad Atallah Putra dan Najwa Khairah Putri Semoga menjnadi anak yangng soleh dan solehan dan menjadi kebanggan keluarga.
5. Dosen pembimbing yang telah memberi ilmu, arahan dan bimbingan yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya, pembimbing I: Prof.Dr.H.J.Suyuthi Pulungan, M.A dan pembimbing II: Ryllian Chandra, M.A
6. Almamaterku dan teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“RELASI KUASA ANTARA KIAI DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL ULUM SAKATIGA DAN PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) OGAN ILIR SUMATERA SELATAN”**

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Sirozi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Dr. Nor Huda, M.A Dekan Fakultas Adab UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. M.Syawaluddin, M.A selaku Ketua Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
4. Prof.Dr.H.J.Suyuthi Pulungan, M.A selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan memotivasi penulis memberi arahan yang bermanfaat.
5. Ryllian Chandra, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan sampai skripsi penulis dapat terselesaikan.
6. KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc Sebagai Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saktiga yang telah memberikan izin dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya, Ayah Sukiman dan Ibu Saila yang telah memberi doa, semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Saudara laki-laki saya dan saudara Ipar saya Wasisno dan Dwi listiani S.pd yang telah membnerika semagat dan doa.

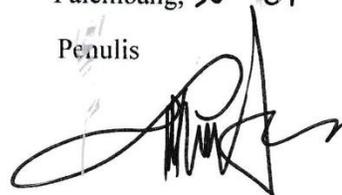
9. Saudara perempuan saya Nislin Asmiarti yang selalu memberikan semangat untuk saya.
10. Keponaan saya Muhammad Athallah Putra dan Najwa Khairah Putri, yang selalu membuat saya bahagia, semoga menjadi anak yang soleh dan solehan dan menjadi kebanggan keluarga.
11. Sahabat seperjuangan saya, Robert Maysandi, M. Aidil Fitriyah, Aris Ikbal Khairullah, Ricky Yudistira, Anggi Dwi Saputri, Hikma Darmah, Aman Syaputra, Jumiati, Intan Trisanti, Utari Indriani dan lainnya. yang selalu memberi saya semangat yang tiada hentinya.
12. Rekan-rekan mahasiswa terutama semua mahasiswa prodi Politik Islam dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Segenap dosen pengajar yang telah berjasa memberi ilmu yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Robbal 'alamin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 30-01-2018

Penulis



Mei Wisnu

NIM.1544300021

ABSTRAK

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta aktivitas pendidikan pembelajarannya sejalan dengan ajaran Islam. Pesantren khususnya kiai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum berfungsi untuk menyampaikan, mendakwakan ajaran Islam kepada masyarakat dan juga aktif menjadi politisi PKS, inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS dengan tujuan memberikan gambaran terhadap hal-hal yang melatarbelakangi relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS, mengetahui adanya bentuk relasi kuasa kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS, serta mengetahui efektivitas relasi kuasa kiai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dokumentasi dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa relasi kuasa antara kiai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS Ogan ilir dilakukan karena adanya persamaan pandangan, diantaranya : faktor Ideologi, faktor Kekeluargaan, dan faktor Keekerabatan. kemudian bentuk relasi yang dilakukan antara keduanya ini yaitu memberikan arahan tentang pandangan politik baik kepada masyarakat terkhususnya di desa Sakatiga, baik itu dalam bentuk kampanye maupun dalam bentuk dakwah sosial masyarakat. Dalam bentuk kampanye, kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum melakukan kampanye untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat ogan ilir dalam memilih partainya. Dalam bentuk dakwah sosial, kiai di Pesantren Raudhatul Ulum melakukan dakwah sosial secara spontan kepada masyarakat Sakatiga tentang hak dan kewajibannya dalam berpolitik, kemudian efektivitas yang dihasilkan oleh Kiai Pesantren dalam relasi ini antara lain banyaknya kiai-kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang memperoleh jabatan politik untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik yang baik. efektivitas dari partai politik yaitu menjalin tali silaturahmi kepada kiai di Pondok Pesantren dan masyarakat Ogan Lir untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, pemimpin yang berakhlakul karimah dan efektivitas dari masyarakat yaitu terjadi pergeseran politik pada pemilihan legislatif 2014 hal ini disebabkan karena kiai sudah gagal dalam merekrutmen atau mengajak masyarakat Ogan Ilir untuk mendukung dirinya, hal ini membuat masyarakat paham akan melek politik.

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Kiai di Pondok Pesantren, PKS.

DAFTAR SINGKATAN

1	PONPES	Pondok Pesantren.
2	RU	Rudhatul Ulum.
3	PPRU	Pondok Pesantren Raudhatul Ulum .
4	PKS	Partai Keadilan Sejahtera.
5	YAPIRUS	Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga.
6	OI	Ogan Ilir.
7	SUMSEL	Sumatera Selatan.
8	KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia.
9	KH	Kiai Haji.
10	LC	Letter Of License.
11	MPW	Majelis Pertimbangan Wilayah.
12	DPW	Dewan Pimpinan Wilayah.
13	MPD	Majelis Pertimbangan Daerah.
14	DPD	Dewan Pengurus Daerah.
15	SRI	Sekolah Rakyat Islam.
16	SMAI	Sekolah Menengah Agama Islam.
17	PIRUS	Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga.
18	TL	Madrasah Tahdhiriyah.
19	MI	Madrasah Ibtidaiyah.
20	MTS	Madrasah Tsanawiyah.
21	MA	Madrasah Aliyah.
22	STIDARUS	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Ulum.
23	ASDIR	Asisten Mudir.

24	KPB	Kasir dan Pembagian Barokah.
25	LOPAD	Logistic dan Dapur.
26	MATQULARY	Madrasah Tahfizul Quran Lil Aulad Raudhatul Ulum.
27	RUSFA	Raudhatul Ulum Scholarship Foundation dan Aitam.
28	SIT	Sekolah Islam Terpadu.
29	OP3RU	Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.
30	BUMP	Badan Usaha Milik Pesantren.
31	HDR-RT	Human Resourse Develotment dan Rumah Tangga.
32	KESLING	Kesehatan dan Lingkungan.
33	SDI	Sumber Daya Insani.
34	TTD	Talim, Tarbiyah, dan Dakwah.
35	PK	Partai Keadilan.
36	HUTBUN	Kehutanan dan Perkebunan.
37	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat.
38	PEMIRA	Penjaringan Pemilihan Raya.
39	MUSWIL	Musyawaharah Wilayah.
40	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
41	OKI	Ogan Komering Ilir.
42	OKU	Ogan Komering Ulu.
43	LIPIA	Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab.
44	MUI	Majelis Ulama Indonesia.
45	DSW	Dewan Syariah Wilayah.
46	FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama.
47	DPTD	Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Wawancara pribadi dengan Kiai Pesantren, Politik dan tokoh Masyarakat.
- Lampiran 2 : Denah Lokasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.
- Lampiran 3 : Data- Data Guru di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.
- Lampiran 4 : Data- data karyawan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.
- Lampiran 5 : Foto- Foto Kiai Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.
- Lampiran 6 : Surat Mohon Izin Penelitian.
- Lampiran 7 : Surat Balasan Izin Penelitian.
- Lampiran 8 : Daftar Pertanyaan dan Jawaban.
- Lampiran 9 : Sk Pembimbing.
- Lampiran 10 : Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing 1.
- Lampiran 10 : Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.
- Lampiran 11 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 12 : Sertifikat Kkn
- Lampiran 13 : Sertifikat Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Bta.
- Lampiran 15 : Sertifikat Puskom
- Lampiran 15 : Transkrip Nilai
- Lampiran 16 : Sertifikat Ospek.
- Lampiran 17 : SK DPW PKS Sumsel.
- Lampiran 18 : SK DPD PKS Kota Palembang.
- Lampiran 19 : Rekapitulasi Cabup Dan Cawabup Tanun 2015.
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Perolehan Suara Legislatif Kabupaten Ogan Ilir 2014.

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Batasan Masalah	17
E. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kegunaan Penelitian	19
F. Definisi Operasional	19
G. Tinjauan Pustaka.....	23
H. Kerangka teori.....	26
I. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Jenis dan Sumber Data	35
3. Teknik Pengumpulan data.....	36

4. Teknik Analisis Data	39
J. Sistematika Penulisan	43
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.....	45
1. Sejarah Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.....	45
2. Struktur dan Kelembagaan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.....	51
3. Visi, Misi dan Tujuan Pesantren Raudhatul Ulum.....	55
4. Struktur Organisasi Kelembagaan Pesantren Raudhatul Ulum	59
B. Sejarah dan Perkembangan PKS	62
1. Sejarah PKS.....	62
2. Tujuan dan Fungsi PKS.....	64
3. Visi dan Misi PKS	64
4. Struktur Organisasi PKS	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hal yang melatarbelakangi terjadinya Relasi kuasa kiai pesantren	74
B. Bentuk-Bentuk Terjadinya Relasi Kuasa	83
C. Efektifitas Relasi Kuasa	92
1. Efektifitas Pesantren.....	92
2. Efektifitas Partai Politik	97
3. Efektifitas Masyarakat.....	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan lembaga pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigeonus*¹. Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia, yang didirikan karena adanya tuntutan perkembangan zaman, hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila diingat kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yaitu menyebar dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau para Da’i². Menurut Ibnu Hajar Pesantren merupakan model pendidikan Islam tertua di Indonesia, meski secara instusi baru dikenal pada abad ke XVII Masehi. Model pendidikan pesantren dapat dibilang sebagai pengembangan dan modifikasi dari model pendidikan agama Hindu sebelumnya.³

Sejarah menjelaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama Islam konon tertua di Indonesia. Berbanding lurus dengan dinamika

¹M.Solthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo dkk, *Menejemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h.1.

²Nawawi, “*Sejarah dan Perkembangan Pesantren*”, Vol.4, No.1, (Juni 2006), h. 2.

³ Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h.34.

kehidupan masyarakat, fungsi itu telah berkembang menjadi semakin kaya dan bervariasi, walaupun pada intinya tidak lepas dari fungsi pertamanya.⁴

Usia tradisi pesantren sangat dipastikan sama dengan usia masuknya Islam di Indonesia, sehingga tradisi ini mempunyai sumber-sumber klasik yang kaya. Selain itu pesantren menjadi bagian dari matarantai pendidikan Islam yang universal, sehingga selain sumber- sumber lokal, pesantren juga mendapat masukan dari luar / asing.⁵ perkembangan pesantren yang begitu pesat juga ditenggarai berkat dibukanya terusan Suez pada 1869. Pada masa awal, pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda, tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf arab dan Al-Quran sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu akidah, dan amalan sufi.⁶

Sebagai model pendidikan yang memiliki karakter khusus dalam perspektif wacana pendidikan nasional sekarang ini, sistem pesantren telah mengandung spikulasi yang bermacam-macam, minimal ada tujuh teori yang mngungkapkan spikulasi tersebut, *teori pertama* menyebutkan bahwa pondok pesantren merupakan bentuk tiruan atau adaptasi pendidikan Hindu dan Budha sebelum Islam datang ke Indonesia, *teori kedua* mengklain berasal dari india, *teori ketiga* menyatakan bahwa model pondok pesantren ditemkan di Banghdad, *teori keempat* melaporkan sumber

⁴Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3S, 1985), h.2

⁵Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam :Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta :Pramadina, 1997), h.20.

⁶M.Solthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo dkk, *Menejemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h 2.

dari perpaduan Hindu – Budha (Pra-Muslim di Indonesia), *teori kelima* mengungkapkan dari kebudayaan Hindu –Budha dan Arab, *teori keenam* menegaskan dari India dan Orang Islam Indonesia, dan *teori ketujuh* meniai dari India, Timur Tengah, dan tradisi lokal yang lebih tua.⁷

Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, kemudian di kurun Wali Songo sampai permulaan abad 20 banyak para wali dan ulama yang menjadi cikal-bakal desa baru. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim (meninggal 1419 di Gresik Jawa Timur), Spiritual father Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa.⁸

Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberi andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (Zaman kerajaan Demak) yang *Ibda`* berjuang mengusir Portugis (abad ke 15), diteruskan masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sampai pada masa revolusi

⁷Mujamil Qomar, *Pesantreen dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga,), h.10.

⁸Nawawi, “*Sejarah dan Perkembangan Pesantren*”, Vol.4, No.1, (Jan-Juni 2006), h. 2.

fisik tahun 1945.⁹ Pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih bebas, terbuka dan demokratisasi.¹⁰

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pesantren mempunyai Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan, yang telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 4, dan pasal 26 ayat 1 bahwa :

“Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya”.

Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa :

“Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.”¹¹

Pondok pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tentang pesantren, hal ini membuat pondok pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang ilegal, namun pesantren diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

⁹Nawawi, “*Sejarah dan Perkembangan Pesantren*”, Vol.4, No.1, (Juni 2006), h. 2.

¹⁰Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta:Erlangga,), h.13.

¹¹<https://Suberia.Wordpress.Com/2010/06/20/Peraturan-Pemerintah-No-552007/> diakses pada 23 Maret 2017 Pukul 20:18 Wib.

Dengan demikian dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-kurangnya ada unsur kiai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kiai, masjid sebagai tempat penyelenggara pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya.¹² Dhofier menyebutkan ada lima elemen pesantren yaitu : pondok, masjid, pengajaran, kitab, santri, dan kiai, ciri ciri pesantren sebagai berikut : **pertama**, Adanya hubungan yang akrab antara santri dan kiai, **kedua**, tunduknya santri pada kiai, **ketiga**, hidup hemat dan sederhana yang dilakukan di lingkungan pesantren dll.¹³ Menurut M. Dewan Rahardjo dalam kutipanya bahwa “Pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan agama saja, tetapi pesantren dikategorikan sebagai lembaga sosial, karena pesantren mampu memberikan perubahan sosial terhadap masyarakat.¹⁴

Dalam melaksanakan perannya, pesantren biasanya dipimpin oleh para kiai. Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Keberadaan seorang Kiai dalam lingkungan sebuah pesantren, adalah laksana jantung dalam kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensialnya seorang kiai, karena dialah pengelola, pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Secara doktrinal, para kiai menganggap dirinya sebagai sunni ortodoks

¹²Hendra Zainuddindan Muhammad Tuwah, *Paradigma Baru Pesantren Masa Depan* (Palembang: Aulia Cendekia Press, 2012), h.36.

¹³Hendra Zainuddindan Muhammad Tuwah, *Paradigma Baru Pesantren Masa Depan*, h.36

¹⁴M.Dewan Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*.(Dalam Skripsi Nopiyan , Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan SKI). Judul : *Peran Pesantren dalam Merehabilitasi Korban Penyalagunaan Narkotika(Kajian Terhadap Pondok Pesantren Ar-Rahman Plaju Darat Palembang tahun 2006-2010* (2015). h.2.

meskipun banyak unsur – unsur dalam praktik keagamaan yang berasal dari sumber - sumber non Islam.¹⁵

Menurut Ibnu Hajar kiai adalah sosok yang kepadanya segala keluh kesah ditumpahkan. patuah kiai adalah obat bagi setiap problem masyarakat dalam hal apapun. Tidak hanya dalam persoalan agama, akan tetapi persoalan ekonomi, persoalan pertanian dan nafkah hidup, hingga persoalan-persoalan rumah tangga. Sosok kiai begitu dekat dihati masyarakat. Pintu rumah kiai laksana Masjid yang kapan pun orang datang bertamu, selalu terbuka. Nafas dan detak jantung kiai adalah pengabdian bagi kemaslahatan dan kebahagiaan santri dan masyarakat. Kiai adalah air minum yang memberi kesegaran bagi musafir yang dahaga dibawah terik matahari. Kiai adalah pewaris para nabi.¹⁶

Di Indonesia, kiai merupakan sosok yang diandang sebagai representatif sebagai ulama , hal ini setidaknya didasarkan pada dua hal *pertama*, kiai adalah orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Kiai zaman dulu bahkan tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu keilmuan agama *an sich*, tetapi lihai juga dalam ilmu kemasyarakatan, perang dan seni –sastra. Ilmu yang mumpuni itu mejadi bekal sekaligus ladang bagi kiai untuk mengayomi dan membimbing masyarakat, *Kedua* kiai selalu bertindas dan berbuat dilandaskan pada kasih sayang dan persaudaraan. Pemaknaan yang demikian didasarkan juga kenyataan bahwa pengabdian kiai

¹⁵Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 25.

¹⁶Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h .8.

terhadap santri dalam mengajarkan kepada masyarakat dalam mengabdikan sepenuhnya tulus dan tidak bertendensi pamrih apapun.¹⁷

Di lingkungan pesantren, keberadaan kiai amat signifikan. Segala bentuk pemikiran, tindak tanduk, dan perilaku kiai dipandang selalu benar serta menjadi figur pelajar bagi santri. Kiai kemudian mempunyai otoritas dan karisma yang memuncak dimana ketaatan santri menjadi sesuatu yang sangat niscaya. Kiai dimata santri lebih dari sekedar guru dalam pengertian modern yang dikenal saat ini kiai adalah sosok yang dicontoh segala perilakunya dan digali ilmunya. Bahkan dalam konteks pesantren, kiai berwujud sebagai raja-jara kecil yang memiliki otoritas penuh terhadap pesantren dan santri.¹⁸

Para kiai ini umumnya memiliki kelebihan yang dipandang sebagai kharismatik atau keramat yang bersumber dari bakat yang dianugerahkan. Karena pesantren dengan para pimpinannya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini biasanya yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik untuk merauk massa.¹⁹

Pada masa reformasi dalam kurun 1999-2009 Islam Indonesia demikian tampak ricuh sekaligus menampilkan peran yang amat penting dalam perpolitikan. dalam dekade ini, Islam sebagai agama mayoritas dengan presentase 87,6 %. Islam Indonesia kini tampak menjadi idola di dunia politik, ini semua tentu merupakan

¹⁷Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik Antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h. 27-28.

¹⁸Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa*, h. 18-19.

¹⁹Abdul Wahid Zini, *Moralitas Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta:Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia,1996,), h.3.

buah reformasi 1998.²⁰ Bahkan pada pemilu 1999 ini sebagian besar kiai dari berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia, secara terbuka mulai memasuki kancah perpolitikan dengan dalih demi kemaslahatan umat.

Sebelumnya Sejauh ini perdebatan tentang keterlibatan kiai pesantren dalam berpolitik selalu berada dalam tarik-menarik dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu :

1. Mengasumsikan bahwa komunitas pesantren merupakan sesuatu yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain, karena pada dasarnya Agama tidak ada larangan kiai pesantren untuk berpolitik.
2. Mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan kiai pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat, hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap kotor.

Berpolitik adalah kewajiban bagi setiap Muslim baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun dalil yang menunjukkan itu adalah dalil-dalil syara yang mewajibkan bagi kaum Muslim untuk mengurus urusannya berdasarkan hukum-hukum Islam. Sebagai pelaksana praktis hukum syara, Allah SWT telah mewajibkan adanya ditengah-tengah kaum Muslim pemerintah Islam yang menjalankan urusan umat berdasarkan hukum syara. Sesuai dengan Firman Allah SWT :

²⁰Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam Kontentasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka, 2012), h.221.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (QS. Al – Maidah : 48)²¹

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah bukti dan alasan bahwa bukan suatu pelanggaran jika kiai pesantren berpolitik praktis, malah jika kiai pesantren hubungkan kepada prinsip-prinsip dasar berpolitik, semuanya menjadi saling menguatkan dengan ayat-ayat al-Qur'an , dan jadilah politik sesuatu yang wajib bagi kita.

Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa diantara kamu melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya (kekuasaan yang

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya 2002.

besar dan bersifat fisik, militer misalnya) apabila tidak mampu maka hendaknya ia merubahnya dengan mulutnya (dengan perkataan, kritik dan nasehat misalnya) apabila tidak mampu juga, lakukan dengan hati (pada diri sendiri yaitu dengan hati, agar tidak mengikuti kemungkaran tersebut juga) dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Sedangkan usaha sangat tergantung dengan sarana kekuasaan, yang jadi permasalahannya selanjutnya adalah cara mendapatkan serta mempengaruhi kekuasaan tersebut. Pada zaman sekarang dengan keadaan yang tidak terlalu menguntungkan, tidak ada cara paling efektif selain berpolitik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih sebagai berikut : “Dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata; Rasulullah SAWbersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar (tunduk) dan patuh dalam perkara yang ia sukai, kecuali jika ia diperintahkan agar berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan dalam maksiat, maka janganlah ia mendengar dan mentaatinya.”(HR. Bukhari no. 7144)²²

Dalam setiap perubahan sosial yang terjadi, sosok kiai sebagai bagian yang tak pernah dipisahkan. Kiai dengan kehidupan sosial masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. kiai telah menjadi kekuatan tersendiri dalam struktur sosial budaya masyarakat, bahkan kiai memegang peran penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakat, hal ini terjadi karena kiai telah menjadi

²²Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim” V, No. Xvii 1 januari 2011.

elit sosial ditengah masyarakat yang dalam struktur social kultural masyarakat dianggap sebagai raja-raja local yang bisah mengarahkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak berlebihan apabila kiai di posisikan layaknya raja yang disanjung dan dihormati.²³

Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi dasar posisi kiai yang sangat signifikan dalam masyarakat :

1. Tingginya derajat mobilitas kiai dalam membangun jaringan hubungan dengan komunitas diluarnya, baik sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan tertentu, sehingga memungkinkan mereka memperoleh informasi baru yang dimiliki santri dan masyarakat sekitarnya.
2. Posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan dipesantren menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang diluar desa, dimana orang-orang yang datang ke desa tidak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kiai.
3. Sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitar, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik.²⁴

Menurut B.J Bolland dalam bukunya "*the struggle of islam in modern indonesia*" pentingnya keterlibatan kiai pesantren berpolitik mempunyai tiga motif yaitu :

²³Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h.17-18.

²⁴Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa*, h.59-60.

1. Motif ideologis, kiai pesantren memposisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Memilih sebuah partai politik sama dengan memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan dalam akaran Islam.
2. Motif kharismatis, mengasumsikan bahwa kiai pesantren memilih berpolitik demi menunjukkan kekuatan kharismaniknya sehingga akan mudah memobilisasi massa.
3. Motif rasional, memposisikan kiai pesantren dalam berpolitik secara rasional. Artinya dalam memilih partai politik benar- benar didasarkan pada pandangan secara rasional.²⁵

Pengaruh kiai pesantren dalam politik ada dibanyak tempat, khususnya di Pondok pesantren Raudhatul Ulum desa Sakatiga, dimana didalamnya menjadi pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang berasaskan Islam, dimana kiai dalam politik yang sering kali menjadi bahan sebagai pemuka agama, terlibat dalam persoalan politik.

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga adalah lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS), berlokasi di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 1 agustus 1950, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum

²⁵Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “ *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik : Study Kasus Pondok Pesantren Al- Munawir, Krappyak, Yogyakarta* V, No.2 (2010), h.204.

Sakatiga merupakan Estafet perjuangan dari dua Madrasah yaitu Madrasah Al –Falah (1930) dan Ash-Shibyan (1936) di desa Sakatiga yang pada masa itu kerap disebut “Mekah Kecil” karena pada saat itu banyak para kiai dan para Alim Ulama yang pernah menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah, Saudi Arabia. Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga didirikan oleh kiai Abd. Rahim Mandung dan KH. Abdullah Kenalim.²⁶ Pondok Pesantren Raudhaul Ulum adalah pondok pesantren yang sangat terkenal tersohor terkhususnya di Sumatera Selatan. Banyak sekali kiai dan ribuan santri yang menetap disana, sehingga ada sebagian kiai menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, namun juga aktif di partai politik terkhususnya di partai keadilan sejahtera (PKS).

PKS adalah salah satunya partai yang bisa dibilang memiliki kekuatan manuver luar biasa. Dinamika internal partai menjelang pemilu diawali dengan mengajukan 8 calon presiden menjadikan PKS sebagai satu-satunya partai yang sudah memiliki calon presiden jauh hari sebelum pemilu presiden bergulir. Kebanyakan figur PKS adalah orang-orang mudah yang memiliki semangat kreatifitas, jika dilihat dari latar belakang politik, mereka sebelumnya dimana tema agama lebih condong jadi jargon, maka pada pemilu 2009 tema kampanye politik PKS lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Strategi pencitraan PKS juga termasuk berbeda dengan partai lain, bahkan tanda PKS adalah partai berbasis islam menjadi tidak begitu terlihat, PKS sudah mulai berbicara substansi dalam kampanye

²⁶Situs Resmi Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga.<http://ppru.ac.id/> diakses 25 Januari 2017 Pukul 19: 00 Wib.

politik 2009. Karakter politik Islam yang santun meski demikian masi ditunjukkan oleh PKS. Kondisi tersebut membuat PKS cukup diminati oleh kalangan muda.²⁷ oleh karna itu banyak kiai yang ada di Pondok Pesantren Raudhaul Ulum juga terlibat dalam politisi PKS.

Keterlibatan kiai berpolitik terkhususnya di pondok pesantren Raudhatul Ulum mulai melakukan suatu hubungan dengan PKS dimana ada sebagian para kiai yang aktif menjadi pengurus dan politisi PKS diantaranya Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum K.H Tol'at Wafa Ahmad yang sekarang menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum juga menjabat sebagai pengurus Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) di DPW PKS Sumatra Selatan, Drs.Dzakir Sukariyo MM, menjabat sebagai pengurus ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) di DPD PKS Ogan Ilir, Sunoto Anam.A.md menjabat sebagai pengurus Dewan Syariah Daerah (DSD) di DPD PKS Ogan Ilir, Joni Fauzan Lc. Ma, menjabat sebagai ketua bidang kadernisasi di DPD PKS Ogan Ilir, dll. Semua peran ganda yang dilakukan oleh kiai di pesantren sebagai bentuk dari efektifitas yang sedang dilakukanya.

Efektivitas kepemimpinan Kiai di pesantren jika ditinjau dari teori kepemimpinan paling tidak memiliki 2 pendekatan yakni :

1. Power-pengaruh mengungkapkan keefekteifan kepemimpinan berdasarkan pendekatan ini ditentukan oleh besarnya power yang dimiliki pemimpin (kiai).

²⁷Firmanzah H.D., *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta,Pustaka, 2010). h.492-493.

Power seorang kiai merupakan kekuatan yang diakui oleh pengikutnya menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi mereka. Power ini dapat berupa kedalaman ilmu sang kiai dalam agama serta otoritas yang dimiliki kiai terhadap pesantrennya.

2. pendekatan sifat (trait theory). pendekatan sifat sering disebut sebagai pendekatan karismatik yakni atribut-atribut personal yang dimiliki kiai misalnya sorotan mata kiai, penampilan, ucapan, intonasi suara sang kiai. Kedua pendekatan ini seandainya terkombinasi secara baik akan menjadikan sang kiai tersebut sosok berkarisma atau sering disebut pemimpin yang berkarismatik.²⁸

Berbicara soal pesantren, kiai dan politik, maka tak lepas dari adanya relasi kuasa antara kiai di pondok pesantren dan partai politik. Relasi dapat di definisikan sebagai hubungan, pertalian, kenalan, pelanggan, yang dilakukan antara dua atau lebih obyek tertentu. Menurut Foucault kekuasaan bukan hanya suatu yang dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah suatu dimensi dari relasi, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan.²⁹

Relasi ini terjadi Khususnya antara Kiai di Pondok Pesantren dan PKS di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam bentuk keterlibatan pemimpin kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum sebagai politisi PKS. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji “Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul

²⁸ Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus dur* (yogyakarta: Ar –Ruzz Media,2004), h.134.

²⁹ Abdullah Khozim Af, “*Konsep Kekuasaan Michel Faucault*” Vol.2,No1, (Juni 2012), h.140.

Ulum Sakatiga dan Partai Politik di Kabupaten Ogan Ilir dengan judul : “*Relasi Kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir Sumatera Selatan*”.

B. Identifikasi masalah

Langkah awal yang dilakukan peneliti, setelah memperoleh dan menghasilkan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan dipelajari. Identifikasi ini dimaksud sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan peneliti tidak keluar dari tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah -masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Kiai Pesantren adalah orang yang dipercayai oleh masyarakat dan mendapatkan gelar dari masyarakat, namun kiai pesantren menjalin hubungan dengan partai politik dan menjadi politisi partai yang notabennya anggapan masyarakat politik identik dengan makna kekuasaan, maka jika kiai aktif menjadi politisi partai sama halnya telah masuk kedalam jebakan sistem yang akrab dengan tradisi korupsi.
2. Terjadinya Relasi antara kiai di Pondok Pesantren dan PKS membuat para Tokoh-Tokoh Elit dipesantren melakukan peran ganda, sehingga peranan dalam mendidik santriwan dan santriwati, dan masyarakat para tokoh Elit Pesantren mempunyai tugas ganda yaitu mengawasi dan memberikan pendidikan kepada para santrinya juga sebagai politisi PKS.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabanya dicarikan melalu penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pembahasan dalam penelitian tentang Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah penelitian pada Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS. Agar permasalahan di atas dapat terarah dengan demikian peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS?
2. Bagaimana bentuk Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS ?
3. Bagaimana Efektivitas Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS ?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Periode relasi dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1998-sekarang.

2. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Ruang Lingkup masalah yang akan diteliti dari permasalahan ini yaitu hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS, bentuk Relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS serta efektivitas relasi kuasa kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan gambaran terhadap hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan PKS.
- b. Untuk mengetahui adanya bentuk relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS.
- c. Untuk mengetahui Efektivitas relasi kuasa antara kiai di pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat, manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan menambah khazanah dan wawasan, terutama dalam bidang sosial politik di Sumatra Selatan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan dalam memahami dan membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti

F. Definisi operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi batasan-batasan dalam pembahasan yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan judul, baik itu oleh pembaca maupun penulis. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memberikan definisi secara menyeluruh. Beranjak dari judul penelitian yang diusung dalam penelitian ini tentang “Relasi Kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dengan PKS Ogan Ilir Sumatera Selatan”. Maka perlu penulis menjelaskan secara detail tentang apa maksud dari judul penelitian ini.

Pertama, kata “Relasi Kuasa” merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara, hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang

mengandung perintah“. Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguít disebut “pemerintah” dan “yang diperintah.”³⁰

Menurut Foucault, bukan milik siapa pun; kekuasaan ada di mana-mana; kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu -ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault mengkaitkan kekuasaan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.³¹

Jadi relasi kuasa adalah bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara, hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin“ atau hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong.

Kedua, kata “Kiai Pondok Pesantren” kata kiai dalam terminologi Jawa memiliki makna sesuatu yang diyakini memiliki tuah atau keramat, artinya segala sesuatu yang

³⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada 25 Januari 2014 pukul 20 :21 WIB

³¹Haryatmoko, *Foucault dan Kekuasaan dalam Majalah Basis*. No 01 -02, Thn ke 51, (Januari- Februari 2002), h.3.

memiliki keistimewaan dan keluar binasaaan dibandingkan yang lain, dalam terminologi Jawa dapat dikategorikan kiai.³² Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe-dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an yang bermakna kata “shastri” yang artinya murid. Sedang C.C. Berg. berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pendapat lain mengatakan, kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan.³³ Menurut M. Arifin, Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama.³⁴

Ketiga, kata “PKS” Partai politik terdiri dari kata partai dan politik, masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda dan menjadi satu dalam istilah partai politik. Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan dan setuju dalam politik.³⁵ Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada jaman klasik Yunani,

³² ³²Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h. 20.

³³Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*,(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 62.

³⁴M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam dan Umum*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm.200.

³⁵Marbun, *Kamus Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), h. 361.

negara atau lebih tepat negara-kota disebut "polis". Plato (± 347 SM) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan politeia dan muridnya bernama Aristoteles (± 322 SM) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan politikon. Pada umumnya politik mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.³⁶

Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.³⁷ Jadi partai politik adalah taktik atau cara yang dilakukan oleh sekelompok yang terorganisir, maksudnya yang mempunyai ideologi sama yang bertujuan memperjuangkan kebenaran melalui kekuatan politik dalam satu level atau tingkat negara.

Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat pada pertama kalinya oleh masyarakat Indonesia pada pemilihan umum tahun 1999, yang pada saat itu masih bernama Partai Keadilan (PK). Partai inilah yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan (PK) lahir pada tanggal 20 Juli

³⁶Marbun, *Kamus Politik, Edisi Revisi*, h. 396-397.

³⁷Syafe'i Ibnu Syafe'idan Azhari. *Sistem Politik Indonesia, Era Soekarno, Hatta, Syahril, Aidit, Syafurudin. Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie. Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamsa Haz. Era SBY, Kalla, Baasyir* (Bandung: Rafika Aditama), h. 45.

1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.³⁸

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain pada awalnya, akan tetapi fokus dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Inong, Jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22 Juli 2010 dengan judul "*Pembelajaran Politik di kalangan Santriwati Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta*" dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di Pondok pesantren tersebut ada pembelajaran politik yang diberikan kiai, dan nyai, namun pembelajaran politik tersebut diberikan dengan cara tidak secara formal namun dapat dipahami melalui nasehat-nasehat kiai dan nyai, seminar-seminar, dan pengalaman kiai dan nyai di dunia politik praktis.
2. Tesis yang ditulis oleh Mahfud Ihsanudin, S.Hum Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 3 Februari 2015 dengan judul "*Pesantren Dan Dinamika Politik Lokal Studi Kasus Pondok Pesantren Assalam, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 1998-*

³⁸M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

2010” Dalam Tesis Ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini adalah, bahwa Pondok Pesantren Assalam tidak bisa lepas dari pengaruh dunia luar. Peristiwa politik di luar Pondok, membuat masyarakat Pondok ikut dalam kancah politik. Dimulai pada masa orde baru 70% masyarakat pesantren Assalam memberikan suaranya kepada partai yang mewakili umat Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan 30% sisanya ada yang ke Golkar dan PDI. Reformasi tahun 1998, membawa masyarakat Pondok Pesantren Assalam untuk lebih aktif dalam partai politik, hal ini di buktikan dengan terjunnya 95% masyarakat Pondok Pesantren Assalam ke dalam partai politik. Pada masa ini pilihannya jatuh pada Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), sehingga Pondok Pesantren Assalam merupakan embrio berdirinya PKS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada tahun 2004, Penguduran diri Ustaz Malik berdampak buruk pada hubungan pesantren Dan PKS, puncaknya pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, PKS dan kegiatannya dilarang dilakukan di Pondok Pesantren Assalam.

3. Desertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Nur Syam, Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “*Kiai, Santri dan Politik: Posisi Kiai dan Santri di Era Transisi*”, dalam desertasi ini membahas tentang Kiai dan tokoh pesantren sering kali menjadi lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kiai dan santri selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam

saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi vote getter dalam pemilu.

4. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011 yang ditulis oleh Rudi Subiyakto, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja AliHaji dengan Judul "*Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)*". dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana Kiai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan massa yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Sebagai imbalan atas jerih payah Kiai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam iming-iming, tidaklah lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Tarik menarik "kepentingan" antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah. Kiai dengan

karismanya mampu memobilisasi massa dalam rangka penggalangan massa untuk berkampanye.

5. Buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar, yang berjudul "*Kiai di tengah pusaran politik antara petaka dan kuasa*". Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana sosok kiai yang aktif menjadi politisi partai mulai mulai tidak dipercayai oleh masyarakat karena keterlibatannya kiai menjadi anggota partai politik.

H. Kerangka Teori

Dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena didalam kerangka teori akan dimuat teori- teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak dalam penelitian, oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok- pokok pemikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disorot.³⁹

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikiti aturan tertentu yang dapat digabungkan secara logis atau dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁴⁰

³⁹Nawawi.H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University press,1995), h.39-40.

⁴⁰ Boleong, L., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya,2002), h.34-35.

Menurut Hafidudin, dalam bukunya yang berjudul : *Dakwah Actual*, Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga diantara lembaga-lembaga *iqamatuddin* lainnya yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kegiatan *tafaqquh fi ad-din* (pengajaran, pemahaman, dan pendalaman ajaran agama Islam), dan fungsi Indzar (menyampaikan dan mendakwakan ajaran Islam kepada masyarakat).⁴¹

Di pesantren Raudhatul Ulum selain berfungsi sebagai kegiatan *tafaqquh fi ad-din* juga berfungsi sebagai kegiatan Indzar karena letak relasi kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren dan masyarakat sangatlah erat. Berbicara mengenai relasi kuasa, ada teori yang menjelaskan tentang relasi kuasa, yaitu menurut Michael Foucault kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur, kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi- relasi antara berbagai kekuatan terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia.⁴²

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat atau

⁴¹Didin Hafidudin, *Dakwah Actual*, (Jakarta :Gema, 1998), h .121.

⁴²A. Khozim Afandi, “*Konsep Kekuasaan Menurut Michael Foucault*” V, No, 01, 2 (Desember 2011), h.140.

pun militer.⁴³ Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut:

1. kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan,
2. Kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan,
3. kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.⁴⁴

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, Akan tetapi perlu

⁴³Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA Press, 2009), h. 31.

⁴⁴Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, h.29.

diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada Pemimpin situasi Pengikut akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.⁴⁵ Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.⁴⁶

I. Metode Penelitian.

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan ungkapan lain, metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian. Dengan demikian, penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, jenis penelitian yang terkait dalam aspek-aspek, yaitu ditinjau dari tujuannya, bidang ilmu, pendekatan, tempat penelitian, dan

⁴⁵Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA Press, 2009), h. 32-33.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali pers, 1994), h, 265.

variabel penelitian.⁴⁷

a. *Penelitian ditinjau dari tujuan*

Penelitian ini menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu penelitian yang dapat ditinjau dari tujuannya. **Pertama**, Penelitian deskriptif, merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala atau fenomena. Penelitian ini juga bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Kedua, Penelitian eksploratif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu dan teknik ini sering juga disebut dengan teknik deskriptif kualitatif. **Ketiga**, Penelitian developmental, penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu model atau *prototype*. Maksudnya dalam penelitian ini, pengujian data dibandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu menyusun disain penelitian.⁴⁸

Selanjutnya yang **keempat**, Penelitian verifikatif yakni penelitian ini untuk menguji dan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya.⁴⁹ Ditinjau dari tujuan, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi,

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

⁴⁸ <https://anfieldvillage.wordpress.com/2013/10/02/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan-tujuan-metode-pendekatan-dan-bidang-ilmu/>

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 8.

kegiatan, peristiwa karena menurut peneliti jenis penelitian ini sangat relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

b. Penelitian ditinjau dari pendekatan

Langkah memilih pendekatan ini tidak dapat diabaikan peranannya dalam menentukan penelitian kualitatif. **Pertama**, Penelitian pendekatan historis, adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek tersebut memosisikan dirinya sendiri.⁵⁰

Kedua, Penelitian pendekatan fenomenologi, menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini, dilakukan dalam situasi yang dialami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu.

Ketiga, Penelitian pendekatan grounded theory, tujuan pendekatan ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan ini

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta., 1997),h.12.

adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat pada konteks peristiwa yang dipelajari.⁵¹

Keempat, Penelitian etnografi, adalah uraian dan penafsiran suatu sistem kelompok sosial. Penelitian ini juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. **Kelima**, Penelitian studi kasus, merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Penelitian ini menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.⁵² Ditinjau dari pendekatan, penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada individu. pendekatan fenomenologi adalah prosedur penelitian yang berangkat dari persepsi-persepsi dan pengalaman- pengalaman subjektif dari individu- individu yang ada dalam suatu sistem sosial.⁵³ Selanjutnya dengan pendekatan ini, penulis mencari suatu gambaran atau menggambarkan data tentang

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,, 1997), h. 14.

⁵² Aulia Harridhi Khilal, “*Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*”, artikel diakses pada 05 Januari 2017 pukul 11:00 WIB dari http://kompasiana.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif_5500cd76ea8341e158b4581

⁵³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h.218.

Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS Ogan Ilir Sumatera selatan.

c. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu

Ragam penelitian di tinjau dari bidang ilmu adalah dalam Setiap bidang ilmu memerlukan pengembangan dengan riset. Begitu banyak ragam yang ada pada penelitian dibidang ilmu. Hal ini karena tentunya tergantung dari siapa yang mengadakan penelitian seperti penelitian pendidikan, (lebih sempit lagi pendidikan guru, pendidikan ekonomi dan kesenian), keteknikan, ruang angkasa, pertanian, perbankan, kedokteran, pendidikan sosial dan lain sebagainya.⁵⁴

Ditinjau dari bidang ilmu, penelitian ini termasuk dalam bidang kajian sosial politik islam. karena dalam penelitian ini mengkaji tentang pemimpin kiai Pesantren Raudhatul Ulum yang sangat dipercaya oleh masyarakat desa Sakatiga dan dipandang sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam nilai-nilai religinya namun kiai pesantren juga aktif sebagai pengurus politisi partai politik khususnya di PKS. Maka, bidang ilmu riset adalah politik Islam atau *politic-Islam*.

d. Penelitian ditinjau dari tempatnya

Pada umumnya, metode-metode pengumpulan fakta dalam ilmu pengetahuan dapat digolongkan kedalam tiga golongan dan masing-masing mempunyai perbedaan pokok, yaitu: ***pertama***, penelitian di lapangan atau *field research*, ***kedua***, penelitian di laboratorium, ***ketiga***, penelitian dalam perpustakaan

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta., 1997),h.12.

atau *library research*. Dalam *penelitian di lapangan*, peneliti harus menunggu terjadinya gejala yang menjadi objek observasinya itu; sebaliknya dalam *penelitian di laboratorium* gejala yang akan menjadi objek observasi dapat dibuat dan sengaja diadakan oleh peneliti. Sedangkan dalam penelitian di perpustakaan, gejala yang akan menjadi objek penelitian harus dicari dari berpuluh-puluh buku yang beraneka ragam.

Selain itu, dalam penelitian lapangan, peneliti harus masuk ke dalam objeknya, artinya peneliti sendiri yang harus memperhatikan hubungan antara objek dan dirinya sendiri, sedangkan dalam laboratorium dan perpustakaan peneliti berada tetap diluar objeknya, artinya dirinya sendiri tidak ada hubungan dengan objek yang ditelitinya itu.⁵⁵ Oleh karena itu, jika ditinjau dari tempat penelitian. Maka, penelitian ini menggunakan lapangan atau *field research* yang dianggap relevan dengan kajian.

Terlepas dari pengertian lebih lanjut tentang *field research*, untuk memperoleh data dengan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

e. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel

Variable merupakan unsur penting dalam penelitian, karena variable mempengaruhi hasil riset penelitian dan objek suatu penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dari istilahnya variabel itulah terkandung makna

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta., 1997), h. 10.

variasi. Berdasarkan waktu terjadinya, variabel dibedakan menjadi variabel masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa mendatang. Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan variabel masa lalu dan masa sekarang termasuk ke dalam penelitian *deskriptif* yang berarti menggambarkan atau membeberkan.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan terhadap variabel masa yang akan datang termasuk kedalam penelitian eksperimen. Karena variabel yang akan datang sebenarnya belum datang atau belum terjadi, akan tetapi, sengaja didatangkan dalam bentuk perlakuan yang terjadi dieksperimen. Maka variabel ini dikatakan variabel masa mendatang.⁵⁷

Ditinjau dari hadirnya variabel, penelitian ini terjadi pada masa lalu-masa sekarang, karena dalam penelitian ini sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Begitu juga dalam penelitian variabel masa sekarang penelitian tetap terlaksana. Oleh karena itu, variabel penelitian adalah Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS Ogan Ilir Sumatra Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dijabarkan secara deskripsi. Menurut Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta., 1997), h. 89.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h.12

yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh) Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵⁸

b. Sumber Data

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua komponen yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data Primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara langsung ke narasumber (*responden*). Yang menjadi narasumber adalah kiai-kiai yang ada di desa Sakatiga Ogan Ilir, serta tokoh masyarakat dan melalui arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki.
- b. Data Sekunder merupakan Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari media massa, makalah dan sebagainya.⁵⁹

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha atau cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun

⁵⁸Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*), h. 225.

penelitian dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Lapangan (*Observasi*)

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya peninjauan atau mengamati secara cermat. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan.⁶⁰ Observasi ini juga diartikan sebagai pengamatan tentang fenomena-fenomena dengan mengamati langsung terhadap objeknya. Dengan melakukan observasi ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data secara umum tentang Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS Ogan Ilir Sumatera Selatan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu komunikasi secara lisan dengan maksud memperoleh informasi tertentu. Metode ini sering disebut dengan *face to face relation*. Dengan tujuan agar memperoleh informasi langsung dengan cara bertatap muka atau bertanya langsung ke informan. Wawancara harus dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Bahasanya harus jelas dan terarah. Begitu juga dengan suasananya harus tetap rileks agar data diperoleh adalah data yang objektif dan dapat dipercaya.⁶¹

⁶⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854

⁶¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 197.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan matreal lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁶² Adapun teknik wawancara yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini antara lain :

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Sakatiga.
2. Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum sekaligus ketua MPW PKS Sumatera Selatan.
3. Wakil Mudir Pondok Pesantren Radhatul Ulum.
4. Pengurus DPD PKS Ogan Ilir bidang Organisasi dan Dakwah.
5. Bidang administrasi Pondok Pesantren Raudhatul Sakatiga.
6. dan, Tokoh Masyarakat sakatiga ogan ilir Sumatera Selatan.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peningkatan tetulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶³ Teknik Dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, notulen rapat, foto, gambar, grafik, katalog, majalah dan sebagainya.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung : Alfabeta,2013), h. 233.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, h. 240.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini dikenal juga dengan istilah *literature study* yang lazim dilakukan dalam penelitian kepustakaan. Kegunaannya adalah untuk memperoleh pemahaman secara lebih tajam dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu digarap oleh peneliti dalam mengolah data.⁶⁴

Analisis data secara umum dapat diartikan sebagai upaya pengolahan, penggolongan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. Tujuan analisa data adalah untuk memperoleh hal-hal yang penting dan menentukan kesimpulan tentang kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁶⁵ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁶⁶

Selanjutnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 191.

⁶⁵ <http://digilib.unila.ac.id/280/12/BAB%20III.pdf> diakses pada 1 januari 2017.

⁶⁶ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 39.

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.⁶⁷

Agar tahap analisis data saling berkaitan satu sama lain. Maka, teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu *penyajian data (display data)*, *reduksi data*, *manipulasi data*, dan *kategori data*. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1) Penyajian Data (*Display Data*) merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.” Maka dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁸

2) Reduksi Data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

⁶⁷ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 147.

⁶⁸ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi data, peneliti dapat mengolah data yang sulit ataupun tidak dapat dipahami dengan cara merangkum, mengambil data yang pokok dan penting.⁶⁹

- 3) Manipulasi data yaitu bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, yang kemudian, dilakukan manipulasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi.⁷⁰
- 4) Kategorisasi Data, yakni proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Dalam melakukan kategorisasi, peneliti akan menemukan kategori-

⁶⁹ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247.

⁷⁰ Jeny Chomaria, *Pengolahan dan Analisis Data*, artikel diakses pada 30 Desember 2016 pukul 10:30 WIB, dari http://pengolahan-dan-analisis-data.blogspot.co.id/2013/pengolahan-dan-analisis-data_3.html

kategori yang bisa saja ditambahkan, dikurangi, atau diganti dalam penelitian. Goezt dan Le Compe dalam *Alwasilah* menyebutnya *contrasting, aggregating, and ordering*, kategorisasi merupakan proses intuitif yang sistematis dan bernalar berdasarkan tujuan penelitian, orientasi dan pengetahuan peneliti, serta konstruk-konstruk yang dieksplisitkan oleh responden. Maka dari itu, kategori-kategori akan muncul melalui proses pencarian yang berulang dan hasil perbandingan dengan kategori lain.⁷¹ Setelah selesai di analisis, sebelum menafsirkan penulis wajib mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan datanya, tujuannya untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul.

Dengan demikian, bahwa tahap analisis data dalam tahapan pekerjaan analisis adalah proses mengidentifikasi elemen demi elemen kebutuhan data suatu fungsi. Elemen-elemen data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, koran atau majalah dan sebagainya atau tahap ini disebut dengan *display data*. Kemudian, *reduksi data*, yakni data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah.

Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan data atau *manipulasi data*, yakni mengubah bentuk awal data menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tahap terakhir adalah menyusun atau

⁷¹ Suci Sundusiah, *Analisis Data Kualitatif*, diakses pada 21 Oktober 2016 pukul 10:WIB dari http://file.upi.edu/Direktori/Fpbs/Jur_Pend_Bhs_Dan_Sastra_Indonesia/Suci_Sindsiah/Artikel_Ilmiyah/Analisis_Data_Kualitatif.Pdf.

mengelompokkan dalam satuan-satuan data yang bertujuan untuk menghindari data yang terlewatkan atau terlupakan yang disebut dengan *kategori data*. Oleh karena itu, untuk memahami data tersebut diperlukan tahap selanjutnya yaitu interpretasi.

Analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi.⁷² Dalam hal ini, peneliti menghubungkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya data-data tersebut disatukan dengan metode historis, yaitu interpretasi. Sehingga mudah dipahami dan jelas. Tahap ini dimaksud dengan tahap **Interpretasi** (penafsiran), yakni berupaya menafsirkan atas fakta-fakta sejarah dalam rangka merekonstruksi realitas masa lampau. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh, kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa politik sehingga dapat dipahami.

Dalam proses interpretasi, penulis juga dituntut untuk imajinatif. Penulis harus berimajinasi masuk kedalam sebuah kurun waktu atau kedalam emosi sehingga dapat merasakan apa yang terjadi.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi empat bab, yang disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi

⁷² Ida Farida, "*Islam Di Cina Pada Masa Republik Nasionalis 1911-1949*" Skripsi (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015), h. 17.

operasional, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Membahas tentang sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Struktur dan Kelembagaan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Visi, Misi dan tujuan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Organisasi Kelembagaan, Sejarah dan Perkembangan PKS, Tujuan dan Fungsi PKS, Visi dan Misi PKS, dan Struktur Organisasi DPW Provinsi dan DPD Ogan Ilir PKS.

Bab Ketiga, Sebagai Inti yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan PKS Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Dalam Bab ini dibahas dengan masalah Hal-hal yang Melatarbelakangi terjadinya Relasi kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS, Bentuk Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS, dan Efektivitas Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS.

Bab Keempat, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah bagian dari inti permasalahan dan pembahasan. Sedangkan, saran adalah hal-hal yang dianjurkan penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas secara keseluruhan.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum

1. Sejarah Pondok Pesantren Raudhatul Ulum

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga adalah Lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS), terletak di desa Sakatiga kecamatan Inderalaya kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 1 Agustus 1950, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga didirikan, sebagai estafet perjuangan dari dua Madrasah sebelumnya, yaitu Madrasah Al-Falah (1930) yang didirikan oleh KH. Abd Ghani Bahri dan Madrasah Al-Shibyan (1936) yang didirikan oleh Kiai Abd. Rahim Mandung dan KH. Abdullah Kenalim. Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga telah berkiprah di tengah masyarakat dan sekarang (tahun 2017) telah memasuki usianya yang ke-66 tahun, dibawah kepemimpinan yaitu :

1. KH. Abdullah Kenalim (tahun 1950-1984)
2. KH. Hizbullah Abdul Mutholib (tahun 1984-1986)
3. KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. (tahun 1986-2004)
4. KH. Abdul Karim Umar (tahun 2004- 2010).
5. KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. (tahun 2010 – Sekarang).⁷³

⁷³ Nadjib subkie, (Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara* tanggal 13 Maret 2017.

Menelusuri dan mencermati kronologi sejarah perkembangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum (PPRU) Sakatiga dari embrio hingga keberadaannya saat ini, dapat kita lihat 3 (tiga) fase/era sebagai berikut ⁷⁴:

1. Era Cikal Bakal (1930 -1950 M)

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga merupakan salah satu pesantren yang cukup terkenal dan tersohor dikalangan masyarakat provinsi Sumatera Selatan. Pesantren ini merupakan estafet dari dua madrasah di desa Sakatiga sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Madrasah Al-Falah dan Al-Shibyan sebagai cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Raudhatul Ulum.

a. Madrasah Al-Falah.

Madrasah ini didirikan Oleh KH. Bahri bin Bunga pada tanggal 15 syawal 1348 H atau tahun 1930 M yang kemudian diteruskan oleh putra beliau KH. Abdul Ghanie Bahri. Madrasah ini banyak menghasilkan tokoh agama dan pemuka masyarakat yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.

b. Madrasah Al-Shibyan.

Pelopop berdirinya madrasah ini adalah seorang ulama besar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu KH. Abd. Rahim Mandung dan KH. Abdullah Kenalim yang dirintisnya pada tahun 1936 M., 9 tahun sebelum Republik

⁷⁴Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

Indonesia diproklamasikan. Hidup dalam masa pergolakan kedua madrasah ini harus berhadapan dengan bermacam-macam tantangan dan hambatan khususnya dari pihak penjajah. Akhirnya semenjak zaman kependudukan Jepang sampai tahun 1950 kedua madrasah ini mengalami masa vakum/stagnasi.⁷⁵

2. Era Lanjutan Perjuangan (1950-1986 M)

Tanggal 1 Agustus 1950, pada era lanjutan perjuangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga didirikan, sebagai estafet perjuangan dari dua madrasah sebelumnya, yaitu Madrasah Al-Falah (1930) dan Madrasah Al-Shibyan (1936). Tahun 1950 atas kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Sakatiga Inderalaya, Provinsi Sumatera Selatan dibentuklah satu panitia khusus untuk melanjutkan dan menghidupkan kembali usaha-usaha yang pernah dirintis oleh Madrasah Al-Falah dan Al-Shibyan sebelumnya yaitu dengan menyepakati untuk mendirikan lembaga pendidikan formal yang diberi nama Sekolah Rakyat Islam (SRI), yang didalamnya mencakup Sekolah Menengah Agama Islam (SMAI) atau setara Madrasah Tsanawiyah, dari kedua nama ini (SRI dan SMAI) kemudian disederhanakan lagi menjadi sebuah lembaga yang bernama : Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (PIRUS) dan nama ini sekaligus dijadikan nama Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS) dengan Akte Notaris Aminus Palembang No. 21.A 1966. Dibawah YAPIRUS ini mulai diperjelas

⁷⁵Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

status/tingkatan pendidikan yang ada menjadi 4 (Empat) jenjang pendidikan formal yaitu :

a. Madrasah Tahdhiriyah (TL)

Madrasah Tahdhiriyah merupakan madrasah yang paling dasar atau tingkatan paling rendah dalam kelembagaan ini.

b. Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Ibtidaiyah adalah madrasah lanjutan dari madrasah Tahdhiriyah.

Madrasah ini terus tumbuh dan berkembang sehingga dikenal oleh masyarakat sebagai madrasah yang berhasil dalam membina anak didiknya. Selama menjalankan masa pendidikan, santri dan santriwati diberikan pelajaran dengan metode yang variatif dan berkesinambungan oleh para pendidik, pengasuh dan juga para kiai senior. Mereka diberi edukasi akhlaq karimah, wawasan keislaman dan ilmu-ilmu umum serta berbagai prestasi yang mengembirakan disambut hangat oleh pihak pemerintah, yang ditandai dengan PIAGAM PENDIDIKAN yang diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah oleh Jawatan Pendidikan Agama Jakarta pada tahun 1960. Madrasah Ibtidaiyah resmi didirikan pada tanggal : 1 Agustus 1950 M dengan No : 12 tahun 1945 jo. No : 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.⁷⁶

⁷⁶Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

c. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditempuh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Madrasah Tsanawiyah ini berdiri tanggal 1 Oktober 1957, dan mendapatkan piagam pendidikan madrasah tingkat Tsanawiyah dengan Nomor : D.6.307.111.88 dan NSM : 212160212007.

d. Madrasah Aliyah (MA)

Madrasah Aliyah (MA) berdiri tepatnya pada tanggal : 25 Oktober 1957, dan mendapatkan piagam pendidikan madrasah tingkat Aliyah dengan dengan Nomor : NPT.W.F.6.4.07.017.88 dan NSM : 312160212018.

Pada era kedua ini (1950-1986 M) PIRUS telah menunjukkan kemajuan yang mengembirakan baik fisik maupun non fisik. Hal ini didukung oleh data statistik jumlah siswa tahun 1967 yang mencapai 911 orang yang berasal dari berbagai penjuru Sumatera bagian Selatan dan daerah sekitarnya.⁷⁷

3. Era Penyempurnaan Dan Pengembangan (1986 s.d Sekarang)

Setelah meninggalnya KH. Hizbullah Abdul Mutholib Pimpinan Pondok Pesanten Raudhatul Ulum Sakatiga, pada tahun 1984, terjadilah kevakuman kepemimpinan untuk melanjutkan perjuangan. Pada tanggal 8 Agustus 1986 melalui musyawarah YAPIRUS Sakatiga menetapkan pimpinan (mudir) baru Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga yaitu Al-Ustadz KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc, yang baru kembali dari tempat tugasnya di Kedutaan Besar Saudi

⁷⁷Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

Arabia Jakarta untuk melanjutkan perjuangan. Beberapa langkah kebijakan cepat yang dilakukan beliau antara lain:

- a. Membenahi stuktur keorganisasian yang ada di lingkungan Pondok Pesantren.
- b. Meninjau kembali kurikulum yang berlaku sebelumnya dan menyempurnakannya dengan sistem terpadu antara kurikulum Pondok Modern Gontor, Pondok Darunnajah Jakarta dan Ma'ahid Islamiyah dalam dan luar negeri serta kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Menyempurnakan nama pondok yang semula bernama “Pondok Pesantren Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga” menjadi Pondok Pesantren Radhatul Ulum (PPRU).⁷⁸

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa sejarah Pondok Pesantren Rudhatul Ulum sangatlah panjang, dimulai dari awal hanya didirikan madrasah –madrasah saja dan kemudian membentuk pesantren di tahun 1950. Perjalanan didirikanya pondok pesantren juga tak lepas dari adanya pemimpin yang ikut serta membangun pondok pesantren diantaranya KH. Abdullah Kenalim (tahun 1950-1984), KH. Hizbullah Abdul Mutholib (tahun 1984-1986), KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. (tahun 1986-2004), KH. Abdul Karim Umar (tahun 2004- 2010)., KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc. (tahun 2010 – Sekarang), dan sekarang pondok pesantren

⁷⁸Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

Raudhatul ulum di pegang oleh KH. Tol'at Wafa Ahmad, Lc sebagai mudir di pondok pesantren raudhaul ulum sakaitga.

2. Struktur dan Kelembagaan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum

Manajemen yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum adalah Manajemen modern, dimana pengelolanya tidak tertumpu pada hanya satu figur pemimpinnya (Kiai), tapi dengan manajemen modern tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilingkungan PPRU ditangani oleh sebuah kepengurusan kepemimpinan kolektif di bawah Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS). Dalam menjalankan programnya, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum membentuk struktur organisasi kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, yaitu terdiri dari *mudir* dan di bantu oleh *najib mudir* (wakil mudir) serta 8 (delapan) asisten mudir (Asdir) yaitu : Asdir Bidang Keuangan dan Ekonomi, Asdir Bidang Kesekretariatan dan Humas, Asdir Bidang Akademis, Asdir Bidang Kesiswaan Putra, Asdir Bidang Kesiswaan Putri, Asdir Bidang Kesiswaan SIT, Asdir Bidang BUMP dan Asdir Bidang HRD dan Rumah Tangga.⁷⁹ Berikut akan dijelaskan struktur organisasi kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat dan Humas

Pada bidang ini, terdapat 2 bagian dibawahnya, Yaitu : Bagian Sekretariat dan Bagian Humas. Tugas Pokok bidang ini adalah sebagai pusat informasi dan

⁷⁹Abdul Karim Umar, (Wakil Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 10 Februari 2017.

data. Pesantren. Melalui bagian humas, menjadi penghubung antara lembaga dan instansi serta masyarakat luas dengan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga.⁸⁰

2. Bidang Keuangan

Pada bidang Keuangan terdapat 2 bagian dibawahnya, yaitu: Bagian KPB (Kasir dan Pembagian Barokah), Bagian LODAP (Logistik dan Dapur). Tugas pokok bidang ini adalah mengelola keuangan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan mengalokasikannya. Mempermudah sistem pembayaran melalui bank dan melakukan komunikasi aktif dengan wali santri terkait kewajiban keuangan. Mengelola keuangan pesantren secara transparan dan akuntable untuk menunjang kegiatan dan pembangunan pesantren secara berkesinambungan sehingga pelayanan pendidikan yang diberikan lebih optimal dan meningkat secara bertahap.⁸¹

3. Bidang Akademis

Bidang akademis adalah bidang yang membawahi seluruh madrasah dan sekolah. Ada 7 (tujuh) lembaga formal dan 1 (satu) lembaga non formal serta 3 bagian yang masuk dalam bidang akademis, yaitu : TK Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP IT, SMA IT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan MATQULARU (Madrasah Tahfizul Qur'an Lil Aulad Raudhatul Ulum). Untuk menunjang program

⁸⁰Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

⁸¹Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*.

pembinaan di madrasah dan sekolah di bawah bidang akademis juga terdapat bagian-bagian penting lainnya yaitu : bagian perpustakaan, bagian bahasa, bagian ta'mirul masjid, bagian olahraga dan kesenian, bagian pramuka dan ketrampilan dan bagian Raudhatul Ulum *Scholarship Foundation* dan *Aitam* (RUSFA).

Tugas pokok bidang ini adalah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada jalur formal, serta melakukan sinkronisasi. Dalam rangka menjaga kualitas dan peningkatan mutu pendidikan, pengkajian serta pengembangan kurikulum dilakukan secara kontinue oleh bidang ini dan jajarannya. Membangun kerjasama (MoU) dengan banyak pihak telah dilakukan oleh bidang akademi untuk menjamin mutu akademi PPRU.⁸²

4. Bidang Kesiswaan

Bidang kesiswaan pesantren di bagi 3 (tiga) *segmen* yang disesuaikan dengan wilayah penempatan santri/wati di asrama. Bidang kesiswaan terdiri dari : Bidang kesiswaan putra, bidang kesiswaan putri dan bidang kesiswaan SIT (Sekolah Islam Terpadu). Tugas pokok bidang ini adalah melakukan pengasuhan, pembinaan dan monitoring santri/wati yang berada diasrama. Secara umum bidang kesiswaan melakukan tugas guidance dan konseling terhadap santri/wati dalam mengamalkan kehidupan yang Islami sesuai dengan ilmu yang telah di peroleh (tadribul amal) yang di bantu oleh

⁸²Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

para guru dan OP3RU (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum).

5. Bidang BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren)

Pada Bidang BUMP terdapat 3 bagian yaitu : Bagian Agro, Bagian Wisma dan Bagian Percetakan dan Penerbitan. Tugas bidang ini adalah melakukan pengembangan usaha ekonomi melalui BUMP. Berbagai jenis usaha telah dikembangkan, seperti : Indomaret, RU Mart, kantin, laundry, rumah makan STC, rumah wallet, perikanan dan perkebunan. Salah satu unggulan dari pengembangan usaha agrobisnis, yaitu : Pembangunan kelapa sawit pada lahan 286 Ha dan pengembangan pupuk organik dengan memanfaatkan potensi alam dan limbah lingkungan.

6. Bidang HRD (Human Resource Development) dan RT (Rumah Tangga)

Pada bidang ini terdapat 5 bagian untuk membantu tugasnya, yaitu: bagian Pembangunan Sumber Daya Manusia, bagian perlengkapan dan pemeliharaan aset pesantren, bagian Kesehatan dan Lingkungan (KESLING), bagian listrik, air dan diesel serta bagian keamanan. Tugas pokok bidang ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang baik dan mengurus kerumah tanggaan di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Jenis kegiatan yang dilakukan bidang ini seperti : Merekrut SDM, membina, memberdayakan dan mensejahterakan mereka, Mengkoordinir muzdakarah guru dan karyawan, kerja bakhti SDM pesantren, Bina

ukhuwah (bantu warga hajatan, lomba mancing, makan bersama SDM pesantren, olahraga bersama dll). Pelayanan (Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan, memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik, memfasilitasi penginapan tamu serta menjaga keamanan pesantren).⁸³

Pondok pesantren Raudhatul Ulum adalah pondok pesantren yang tersohor disumatera selatan, tak heran jika peminat dari pondok pesantren ini tidak hanya orang Sumatera melainkan diluar Sumatera, hal ini dikarnakan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum mempunyai perlengkapan yang memadai dari berbagai bidang diantaranya Bidang Keuangan dan Ekonomi, Bidang Kesekretariatan dan Humas, Bidang Akademis, Bidang Kesiswaan Putra, Bidang Kesiswaan Putri, Bidang Kesiswaan SIT, Bidang BUMP dan Bidang HRD dan Rumah Tangga, dari bidang diatas tidak lepas dari masing masing kegunaan dan fungsi dan juga tidak sedikit pula pengurus yang ada bidang –bidang tersebut sehingga dengan adanya masing-masing pengrrurus maka semua bidang akan tertata dengan rapi,seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1. sehingga dengan banyaknya bidang yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum maka tidak begitu mengherankan jika Pondok Pesantren Raudhatul Ulum disebut sebagai pesantren yang terkenal di Sumatera Selatan.

⁸³Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

3. Visi, Misi, dan tujuan Pesantren Raudhatul Ulum

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga sebagai lembaga pendidikan Islam, telah merumuskan visi, misi, tujuan dan program aksinya. Komponen-komponen tersebut sangat penting untuk memberikan arah dan motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh unsur yang terkait langsung dalam pengembangan PPRU. Visi, misi dan tujuan juga berfungsi untuk menyatukan fikrah, persepsi, cita-cita dan harapan-harapan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan pengembangan pesantren. Keberhasilan, kemajuan dan keunggulan prestasi PPRU sangat tergantung pada sejauh mana misi yang diembannya dan program yang direncanakan dapat dipenuhi dan dilaksanakan. Sebagai lembaga pendidikan Islam alternatif, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga memandang perlu merumuskan visi, misi, tujuan dan program aksi. Komponen-komponen tersebut sangat penting keberadaannya guna memberikan arah dan motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh unsur yang terkait langsung dalam pengembangan PPRU. Disamping itu visi, misi dan tujuan dapat berfungsi untuk menyatukan fikrah, persepsi, cita-cita dan harapan-harapan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengembangan pesantren. Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga adalah lembaga pendidikan Islam dengan visi, misi dan tujuan sebagai berikut.⁸⁴

⁸⁴Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

a. Visi

Menjadi basis kaderisasi generasi terbaik (khoiru Ummah) yang bermanfaat luas dan berdaya saing global.

b. Misi

Ta'lim

Menyelenggarakan kegiatan pengajaran secara utuh dan terpadu untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani yang memiliki wawasan yang luas.⁸⁵

Tarbiyah

Menyelenggarakan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Islam kepada santri/wati sebagai proses pembentukan kepribadian menuju sumber daya insani yang memiliki kekokohan moral, kecerdasan emosional dan spiritual.

Dakwah

Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pelatihan dakwah Islamiyah kepada santri/wati, sehingga dapat merangsang munculnya sumberdaya insani yang memiliki kepekaan sosial dan mengambil bagian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

⁸⁵Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

c. Tujuan

Tujuan kelembagaan tersebut mendambakan profil lulusan PPRU yang memiliki kompetensi dasar yang dituangkan dalam 10 jati diri Sumber Daya Insani (SDI) santri Raudhatul Ulum sebagai berikut :

1. Memiliki kelurusan aqidah yang bersumber dan berasaskan kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Salimul 'Aqidah*).
2. Tekun dan benar dalam beribadah sesuai dengan petunjuk yang disyari'atkan kepada Rasulullah SAW (*ShahihulIbadah*).
3. Selalu tampil sebagai *uswahhasanah* yang bertumpu pada ketangguhan dan keterpujian akhlaq, sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat (*Matinul Khuluq*).
4. Mempunyai kemampuan menunjukkan potensi dan kreativitasnya dalam dunia kerja (*Qadirun 'AlalKasbi*).
5. Senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan (*MutsaqqafulFikri*).
6. Memiliki kekuatan fisik melalui sarana-sarana yang dipersiapkan secara Islami (*QawiyulJismi*).
7. Tegar berjihad memerangi hawa nafsunya dan senantiasa mengokohkan diri diatas hukum Islam melalui ibadah dan amal sholeh (*Mujahid Li al-Nafsi*).
8. Terampil mengatur segala urusannya sesuai dengan ketentuan Islam. Setiap pekerjaan yang tidak teratur akan berakibat pada kegagalan (*Munadzam Fi Syuunihi*).

9. Menghargai, memelihara dan memanfaatkan waktu dengan baik sehingga terhindar dari kelalaian dan perbuatan sia-sia (*Harisun 'AlaWaqtihi*).
10. Aktif menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan (*Nafi' al-Ghairihi*).⁸⁶

Dari penjelasan diatas, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum adalah yang cara pengajarannya menggunakan sistem modern, terlihat bahwa pesantren ini tidak hanya mengajarkan tentang sesuatu yang berifat Agama saja, melainkan di Pondok Pesantren ini tidak sedikit juga yang menggunakan kurikulum pendidikan umum seperti pelajaran bahasa Inggris dll,serta di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum juga mengajarkan para santri dan santriwan bagaimana cara berdakwa yang baik, itu artinya di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum juga mengajarkan bidang sosial juga dengan tujuan bisa menjadi panutan bagi masyarakat nantinya .

4. Organisasi Kelembagaan

Manajemen yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum adalah Manajemen modern. Dalam arti pengelolanya tidak tertumpu pada hanya satu figur pemimpinnya (Kiai). Dengan Manajemen modern tersebut, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilingkungan PPRU ditangani oleh sebuah kepengurusan dibawah Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (YAPIRUS). Kepengurusan ini dikepalai oleh Mudir sebagai pucuk pimpinan eksekutid dibantu 5 (empat) Kepala Bidang dan Sekretaris Bidang. Dilengkapi 13 Kepala Bagian dan beberapa seksi dan staff. Pelaksanaan pendidikan formal

⁸⁶Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*, pada 26 Februari 2107.

pengelolaannya ditangani langsung oleh madrasah-madrasah dengan struktur organisasi otonomi dan tetap dalam jalur koordinasi Bidang Ta'lim, Tarbiyah dan Dakwah (TTD).

Dalam menjalankan programnya, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum membentuk struktur organisasi kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, yang terdiri dari 5 bidang sebagai Pembantu Mudir, yaitu : Pudir Bidang Keuangan dan Ekonomi, Pudir Bidang Kesekretariatan Humas dan SDM, Pudir Bidang Akademis, Pudir Bidang Kesiswaan dan Pudir Bidang Rumah Tangga.⁸⁷ Berikut struktur organisasi yang ada di pondok pesantren Raudhatul Ulum:

TABEL 1
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Desa Sakatiga
Ogan Ilir Sejaterah Sumatra Selatan.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.H Nadjib subkie	Ketua Yayasan PPRU
2	K.H Tol'at Wafa Ahmad Lc	Mudir PPRU
3	KH. Abdul Karim Umar	Naib Mudir PPRU
4	Abdul Muhaimin, S.sos.i.M.S.i	Kepala Rumah Tangga PPRU
5	Salamuddin, S.Si	Pudir Bidang Sekretariat PPRU
6	Hj. Risa Fauziah Aristina	Pudir Bidang Keuangan PPRU
7	Husnul Amin, Lc.,M.H.I.,M M. Pd.	Pudir Bidang Akademis PPRU
8	H. Asnawi KM, Lc	Pudir Bidang Kesiswaan PPRU
9	Susilo, A.Md.	Pudir Bidang Rumah Tangga

Sumber : Data diperoleh dari Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum pada 26 Februari 2017 pukul 11:00 WIB.

⁸⁷Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara* 13 Maret 2017.

Dari tabel 1. Dijelaskan Mengenai Struktur Organisasi Pondok Pesantren Raudhaul Ulum, Struktur Organisasi di Pondok Pesantren Raudhaul Ulum Sangatlah Baik. Seperti Dijelaskan Pada Tabel 1. Masing- Masing Mempunyai Kedudukan Sebagai Pengurus Dibidangnya, Sehingga Dengan Adanya Pembagian Pengurus, Maka Struktur Kepengurusan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bisa teratasi dengan baik. Menyinggung masalah sejarah kepengurusan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Bahwa K.H Tol'at Wafa Ahmad Pernah Vakum Sementara Menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan digantikan kepada KH. Abdul Karim Umar Pada Periode 2004- 2009. Itu dikarenakan KH. Tol'at Wafa Ahmad Menjabat Anggota Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan, namun itu tidak mempengaruhi kinerja kepengurusan menjadi terlalainkan. Kemudian KH. Tol'at Wafa Ahmad Menjabat lagi Menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum pada tahun 2010 hingga tahun 2017 (Sekarang).

B. Sejarah Dan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemunculan Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat pada pertama kalinya oleh masyarakat Indonesia pada pemilihan umum tahun 1999, yang pada saat itu masih bernama Partai Keadilan (PK). Partai inilah yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan (PK) lahir pada tanggal 20 Juli

1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.⁸⁸

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah

⁸⁸M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.

Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 – 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 – 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.⁸⁹

2. Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera

Tujuan PKS, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam anggaran dasar rumah tangga partai keadilan sejaterah Pasal 8 fungsi Partai PKS, yaitu :

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara; serta

⁸⁹<http://sumsel.pks.id/profil/sejarah-ringkas/> diakses pada 25 Maret 2017 pukul 20.52 Wib.

c. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁰

3. Visi dan Misi Partai keadilan sejahtera (PKS)

1. Visi Partai keadilan sejahtera (PKS)

Visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

2. Misi Partai keadilan sejahtera (PKS)

Misi PKS adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.⁹¹

Masyarakat Madani maksudnya, masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

Adil maksudnya, kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara

⁹⁰M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

⁹¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Bab II pasal 5 dan 6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).

Sejahtera maksudnya, secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera.

Bermartabat maksudnya, bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai.⁹²

4. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Selatan.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan

⁹²Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008).h.1-2.

Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum., Tugas Dewan Pimpinan Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu: tugas struktural, tugas konsepsional, dan tugas manajerial.⁹³

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatra Selatan didirikan pada era reformasi pada tahun 1998. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera terletak di kota Palembang tepatnya di Jl. Demang Lebar Daun No.2599 B RT 01 RW 02 Kel. Bukit Baru kecamatan Ilir Barat 1 Sumatra Selatan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera membentuk suatu struktur organisasi dengan cara melalui proses penjangkauan Pemilihan Raya (Pemira) dan pembahasan dimusyawarah wilayah (Muswil). Dalam pemilihan tersebut terdapat anggota dewan pengurus tingkat wilayah DPTW Partai Keadilan Sejahtera Sumatra bagian Selatan. Berikut nama-nama Anggota DPTW Sumsel antara lain :

TABEL 2
Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatra Selatan masa Khitmah 2015-2020.

NO	NAMA	JABATAN
1	K.H Tol'at Wafa Ahmad Lc	Ketua MPW PKS
2	H. Imam Mansur, Lc	Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS
3	Erza Saladin, ST	Ketua Umum DPW PKS
4	H. Jonni Yulianto, ST, MM	Sekretaris MPW DPW PKS
5	Sumarno Ahmad Jamil, Lc	Sekretaris DSW PKS
6	M. Toha Oni, S.Ag	Wakil Ketua Umum DPW PKS

⁹³Tol'at Wafa Ahmad, (Ketua MPW PKS di DPW PKS Sumsel), *Wawancara* 15 Maret 2017.

7	Irwan Irawadi, S.IP	Sekretaris Umum DPW PKS
8	H.Muhammad Tukul, MM	Bendahara Umum DPW PKS
9	Hj. Fanin	Bidang Perempuan DPW PKS
10	Farid Muliana	Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS

Sumber : sumsel.pks.id/blog/inilah-nama-nama-dptw-pks-sumatera-selatan/ diakses pada tanggal 2 januari 2017 pada pukul 21:00 WIB.

Dari tabel 2. Dijelaskan tentang Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan. Dalam struktur tersebut K.H Tol'at Wafa Ahmad sebagai kiai sekaligus Mudir di Pondok Pesantren Rudhatul Ulum juga Aktif menjadi Politis di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan, Selain sebagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan K.H Tolat Wafa Ahmad Lc juga pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan pada masa periode 2004-2009.

Jika K.H Tol'at Wafa pernah menjadi anggota legislatif dan aktif sebagai pengurus partai PKS sekaligus menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum sakatiga, hal ini berbeda dengan K.H Imam mansyur yang pernah aktif mengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum sekarang aktif menjadi politisi PKS. Ustadz Imam menyelesaikan pendidikan dasarnya (MI dan MTs) di Tugulmulyo, OKI dan menyelesaikan pendidikan menengah (MA) di Sumatera Barat. Setamat Mabdrasah Aliyah, sempat mengajar beberapa bulan di salah satu Pondok Pesantren di Tugulmulyo baru kemudian

melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta. Beliau dilahirkan di Desa Karangsari, OKU Timur pada 25 November 1972. K.H Iimam manyur pernah aktif mengajar di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dari tahun 1999 sampai 2004, kemudian menjadi Anggota DPRD OKI, Sumsel dari tahun 2004 sampai tahun 2009, dan Anggota DPRD Sumsel dari tahun 2013 sampai 2014. Selain itu, beliau juga pernah aktif Ketua Komisi Fatwa MUI OKI, Wakil Ketua Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama, Ketua Bidang Kaderisasi Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di OKI, Saat ini, sebagai anggota dewan Ustadz Imam juga diamanahi sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sumsel.

Begitu juga dengan Muhammad Iqbal Ramzi beliau adalah anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili dapil Sumatera Selatan II setelah memperoleh suara 38.652. dari sisi sejarah Iqbal adalah legislator senior PKS di Sumatera Selatan. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dan juga Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) PKS Sumatera Selatan. Beliau juga mantan dosen di IAIN Raden Fatah Palembang yang sekarang berubah jadi UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 1993-2000. Iqbal juga pernah dicalonkan menjadi wakil walikota Palembang dengan pasangannya Sarimuda. Beliau juga mengajar di Pondok Pesantren Raudhatul

Ulum (PPRU) dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Ulum (STIDARUS) tahun 1987 – sekarang.⁹⁴

b. Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Ogan Ilir

Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Daerah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota mencakup struktur organisasi Partai di bawahnya. Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara.⁹⁵

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Ogan Ilir letaknya di Kabupaten Ogan Ilir, Kelurahan Indralaya Indah, kecamatan indralaya yang tepatnya di daerah komplek pertamina blok C No.5 kabupaten ogan ilir sumatera selatan. Dalam Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) keempat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir berlangsung secara khidmat. Acara yang diadakan di Aula Rumah Makan Sederhana Indralaya tersebut berjalan dengan lancar dan aman sejak pagi, Sabtu (24/10) tidak ada kendala berarti. Pada Musda keempat ini, diumumkan juga hasil Pemilihan Umum Internal (PUI) yang diadakan oleh PKS OI. PUI yang dilaksanakan pada 4 Oktober

⁹⁴ Situs resmi DPW PKS Sumsel <https://sumsel.pks.id> diakses pada 10 Januari 2018 pukul 06:00 Wib.

⁹⁵M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah) ,*Wawancara*, 5 April 2017.

2015 yang lalu tersebut diadakan untuk menjaring nama-nama kader untuk mengisi posisi Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS OI. Askweni terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Ogan Ilir. Berikut susunan lengkap nama-nama Anggota DPTD PKS Ogan Ilir:

TABEL 3

Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Ogan Ilir masa Khitmah 2015-2020.

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.Dakir.Sukariyo	Ketua MPD PKS
2	Muji Winoto	Sekretaris MPD PKS
3	H. Sunoto Anan, A.Md.	Ketua Dewan syariah Daerah
4	Abu Abdillah	Sekretaris Dewan syariah Daerah
5	H. Askweni,S.Pd	Ketua Umum
6	H.Husnul Anan,S.HI	Wakil Ketua Umum
7	Hardi Aji Badarwi,S.Si	Sekretaris Umum
8	Kms.M.ade Isnaini,ST	BendaharaUmum
9	H.Joni Fauan,Lc,MA	Bidang Kaderisasi
10	Evin Winata,S.Pd	Bidang Generasi Muda, Profesi
11	Erlis Adham,ST	Bidang Perempuan
12	Budi Setiawan, S.Pd	Bidang ekonomi dan sosial
13	M. Sirjuddin, SE	Bidang Kebijakan Publik
14	M. Ridho S.Ag	Bidang organisasi dan Dakwah

Sumber : <http://sumsel.pks.id/blog/askweni-pimpin-dpd-pks-ogan-ilir-2015-2020/> diakses pada tanggal 2 januari 2017 pada pukul 20:10 WIB.

Dari tabel 3. Dijelaskan tentang Struktur Organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan ilir. Dalam struktur tersebut kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan ilir tak lepas dari struktur kepengurusan yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dimana kiai –kiai yang ada di Pondok

Pesantren Raudhatul Ulum ada sebagian yang menjadi politisi dipartai tersebut diantaranya Drs.Dakir.Sukariyo pada masa khidmah Februari – Juni 2010. Drs.Dakir Sukariyo pernah menjabat sebagai kamad SMAIT di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan sekarang menjadi pengurus di Pondok Pesantren sebagai Asisten Mudirr (ASDIR) Akademis B di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan pada tahun 2010 -2015. Drs.Dakir.Sukariyo juga aktif menjadi politisi PKS Ogan Ilir sebagai ketua umum PKS sekarang pun Drs.Dakir Sukariyo aktif menjabat sebagai Ketua Majelis pertimbangan daerah (MPD) Partai Keadilan Sejahtera PKS Ogan Ilir.

Kemudian H.Husnul Anam,S.HI pada masa khitmah Februari – Juni 2010 beliau pernah menjadi Pengurus Pesantren Raudhatul Ulum sebagai kamad Bidang Akademis di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum setelah itu pada masa khitmah 2010-2015 beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus PKS Ogan Ilir bidang kaderisasi, dan sekarang H.Husnul Anam,S.HI aktif sebagai Asisten Mudir (ASDIR) Akademis A di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum tidak hanya itu, H.Husnul Anam,S.HI juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan ilir. Kemudian *M. Ridho S.Ag* menjadi Pengurus di Pondok Pesantren sebagai Ketua Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan menjabat sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Bidang Organisasi dan Dakwah di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan ilir. selain pengurus partai, *M. Ridho S.Ag* juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir pada periode 2009- 2014 dan menjabat lagi menjadi anggota legislatif namun gagal dalam pemilihan tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir Sumatera Selatan.

1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS

Sebelum peneliti membahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya relasi kuasa, peneliti akan menjelaskan secara umum tentang relasi dan kuasa. Menurut (KBBI) kamus besar bahasa Indonesia, Relasi adalah hubungan, pertalian, perhubungan, kenalan, pelanggan. Jadi relasi disini adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyatukan persamaan maupun perbedaan sesuai dengan maksud dan tujuan, sehingga dengan adanya relasi akan terciptanya dan tercapainya kerjasama dengan baik. Kemudian istilah kuasa dibentuk dari kata kekuasaan, dalam kamus kata kekuasaan diberi arti dengan kuasa (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya) kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Sedangkan kata *kuasa* sendiri diberi arti dengan :

1. kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
2. kuasa adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya.
3. kuasa adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengurus mewakili dan sebagainya
4. kuasa adalah mampu, sanggup, kuat.
5. kuasa adalah pengaruh gengsi kesaktian dan sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).⁹⁶

Dari pengertian diatas bahwa kata kekuasaan selain berunjuk dari kata benda (kemampuan, kesanggupan dan kekuatan), juga merunjuk pada makna sifat yaitu orang yang diberi kewenangan, hal ini makna yang mendasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dengan tiga arti yaitu kemampuan, kewenangaan, dan pengaruh.

Menurut Foucault, Kekuasaan bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di manamana, kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault menguatkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi

⁹⁶Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h..52.

pengetahuan-pengetahuan yang menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

Foucault menunjukkan ada lima teori mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.⁹⁷

Jadi, Relasi Kuasa adalah hubungan yang melibatkan antara satu orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai opini publik sesuai dengan keinginan masing-masing pihak sehingga terciptanya kepercayaan di masyarakat, karena dengan dibentuknya

⁹⁷Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik" V 18, No, 1 (Januari 2013), h.80.

relasi bisa menimbulkan citra positif di masyarakat, menciptakan partisipasi publik dan lain-lain.

Berbicara mengenai relasi kuasa, kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum telah lama menjalin relasi dengan partai politik terutama yang sekarang bekerjasama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti yang telah penulis wawancari dengan K.H Tol'at Wafa Ahmad bahwa terjadinya hubungan antara keduanya dimulai pada tahun 1998 yang mana pada masa itu terkhususnya pada era reformasi kiai pesantren mulai bisa mengekspresikan diri untuk ikut serta dalam dunia perpolitikan, karena kalau melihat sejarah nabi Muhammad SAW beliau juga berpolitik, beliau menyebarkan agama Islam dengan cara berpolitik melalui berdakwa. maka dari itu, dengan adanya relasi, hal ini di latarbelakangi karena landasan ideal yang sama-sama memperjuangkan keumatan, khususnya masyarakat Ogan Ilir belum terlalu memahami tentang dunia politik, mereka menganggap politik itu kotor maka dengan adanya relasi ini kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bisa membuktikan kepada masyarakat Ogan Ilir bahwasanya politik itu tidak seburuk apa yang mereka bayangkan. Untuk kepentingan relasi atau hubungan kerjasama antara keduanya, maka kedua relasi ini saling mengisi dan mengakomodasikan apa yang dibutuhkan umat Islam pada saat ini dan untuk masa yang akan datang, tujuannya sama-sama mengusung kepentingan umat Islam.⁹⁸

⁹⁸ Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Maelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

Berbicara mengenai latar belakang terjadinya relasi kuasa, K.H Tol'at Wafa Ahmad adalah Mudir dari Pondok Pesantren Raudhatul Ulum di desa Sakatiga, selain sebagai Mudir, K.H Tol'at Wafa Ahmad juga aktif menjadi politisi di PKS yang tujuannya untuk memberikan arahan kepada masyarakat desa Ogan Ilir tentang politik yang berakhlakulkarimah. pada tahun 2004 K.H Tol'at Wafa Ahmad pernah menjabat sebagai anggota legislatif tingkat Provinsi di Sumatera Selatan, pada masa itu, K.H Tol'at Wafa Ahmad masih menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, namun semenjak menjadi anggota dewan, K.H Tol'at Wafa Ahmad vakum menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan digantikan oleh K.H Abdul Karim Umar selama lima tahun jabatan.

Pada tahun 2009 K.H Tol'at Wafa Ahmad menyelesaikan jabatan anggota legislatifnya dan kemudian K.H Tol'at Wafa Ahmad mencalonkan menjadi wakil bupati, namun usahanya gagal. Pada tahun 2010 K.H Tol'at Wafa Ahmad kembali menjadi Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul ulum dan K.H Abdul Karim Umar menjabat sebagai wakil mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga hingga sekarang. Selesai menjadi anggota dewan legislatif bukan berarti selesai juga menjadi politisi di PKS, selama menjadi Mudir pondok Pesantren Raudhatul Ulum sakatiga K.H Tol'at Wafa Ahmad juga aktif menjadi pengurus PKS, bahkan hingga sekarang K.H Tol'at Wafa Ahmad menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah

(MPW) di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan.⁹⁹

Dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai bapak Nadjib Subkie sebagai ketua Yayasan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Beliau mengatakan bahwa adanya relasi antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ideologi yang sama-sama berideologi Islam, faktor kharismatik kiai pesantren yang ingin menolong kesesatan umat dan ingin membuktikan bahwa politik bukan semata-mata hal yang bersifat fronal (kotor) dan faktor rasional yang mengajak kiai pesantren untuk menjadi pemimpin politik dan mengajarkan kepada masyarakat secara rasional agar terhindar dari kesesatan politik.¹⁰⁰ Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh teori B.J Bolland dalam bukunya “*The Struggle Of Islam In Modern Indonesia*” pentingnya keterlibatan kiai pesantren berpolitik dalam yang mempunyai tiga motif dalam kutipanya Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, sebagai berikut :

1. Motif Ideologis, Kiai Pesantren memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Memilih sebuah partai politik sama dengan

⁹⁹Tol’at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Maelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

¹⁰⁰Nadjib Subkie (Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 06 April 2017.

memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan dalam ajaran Islam.

2. Motif Kharismatis, mengasumsikan bahwa Kiai Pesantren memilih berpolitik demi menunjukkan kekuatan kharismaniknya sehingga akan mudah memobilisasi massa.
3. Motif Rasional, memosisikan Kiai Pesantren dalam berpolitik secara rasional. Artinya dalam memilih partai politik benar- benar didasarkan pada pandangan secara rasional.¹⁰¹

Kemudian hal yang melatarbelakangi lainnya dalam relasi ini adalah adanya relasi kiai di pondok pesantren yang kental akan Islamnya sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bila dilihat dari sejarahnya, bahwa partai ini lahir dari gerakan dakwah kampus yang berbasis Tarbiyah. Dengan adanya relasi ini justru kedua pihak saling menguatkan satu sama lain demi kepentingan umat Islam. Untuk mencapai sebuah kekuasaan itu memerlukan lembaga politik , karena tanpa lembaga tersebut kekuasaan tidak akan tercapai karena pada sadarnya politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat.¹⁰²

Terjadinya hubungan antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena adanya kesamaan pandangan yaitu sama-sama berideologi Islam yang bertujuan untuk sama-sama membantu keselamatan umat

¹⁰¹Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “ *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik : Study Kasus Pondok Pesantren Al- Munawir, Krpyak, Yogyakarta* V, No.2 (2010).h.204.

¹⁰²Nadjib Subkie (Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 06 April 2017.

Islam dari keterpurukan politik, dan mengingatkan tentang pentingnya masyarakat untuk berpolitik yang berakhlakul karimah. Selain adanya kesamaan pandangan, kesamaan kekeluargaan, dan kesamaan kekerabatan juga ada dalam relasi tersebut. Menurut Romadhon dari persamaan pandangan kiai di Pondok pesantren Raudhatul Ulum dan PKS sama-sama berideologi Islam, dari persamaan kekeluargaan yaitu K.H Tol'at Wafa Ahmad Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Muhammad Iqbal Ramzi sebagai anggota DPR RI masih ada ikatan keluarga yaitu keduanya bermisanan, kemudian dari pandangan kekerabatan antara K.H Tol'at Wafa Ahmad dan Hidayat Nur Wahid mereka satu almamater di Pesantren Gontor.¹⁰³ Perlu diketahui Hidayat Nur Wahid adalah wakil ketua MPR RI. Pada 15 Oktober 2017 Hidayat Nur Wahid dan Muhammad Iqbal Ramzi melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dalam rangka Sosialisasi 4 pilar MPR RI yang bertepatan di Masjid Al- Bukhari Raudhatul Ulum Sakatiga.

Hasil uraian diatas menjelaskan adanya relasi antara keduanya, yang dikemukakan oleh K.H Abdul Karim Umar sebagai Najib Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, beliau menjelaskan bahwa terjadinya relasi kuasa antara keduanya memang ada hubungan, namun proses terjadinya hubungan ini hanya sebatas individu atau perorangan saja terkhususnya orang-orang yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, mereka rata rata orang-orang PKS. Hal ini dilatarbelakangi karena pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang

¹⁰³ Romadhon (Sekretariat dan Humas PPRU), *Wawancara*, 22 November 2017.

mengajarkan tentang keagamaan sekaligus tempat para santri untuk memahami ilmu Agama, sedangkan partai politik itu organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi massa, untuk mencari kekuasaan. maka dengan ini terjadi perbedaan yang mencolok antara pesantren dan partai politik, hal ini wajar jika tidak terjadi relasi antara kedua lembaga tersebut, namun tidak mengharamkan juga jika kiai di pesantren ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan.¹⁰⁴

Dengan bedanya argumen tentang relasi kuasa antara kiai Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), penulis masih penasaran tentang sejauh mana relasi tersebut maka dari itu penulis juga mewawancarai M.Ridho, beliau sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dikabupaten Ogan Ilir bidang Organisasi dan Dakwah dan juga pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam relasi kuasa tersebut beliau mengatakan bahwa Relasi Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai dua motif yaitu *pertama* dalam Partainya mencari orang yang diamanahi atau mencari orang yang dicalonkan dan, yang *kedua*, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dalam suatu lembaga. Karena secara lembaga dan organisasi bersifat non partisipan, artinya keduanya tidak mengikat dalam satu partai, pada dasarnya siapapun bisa menjalin kerjasama kepada kiai Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun jika dalam kaitan pribadi maka pribadi dengan pribadi. Berbicara mengenai relasi ini bahwa pernah terjadi juga di Pondok

¹⁰⁴K.H. Abdul Karim Umar (Najib Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 27 Februari 2017.

Pesantren calon dari partai lain artinya kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum tidak mengikat dalam satu partai atau nonpartisipan, tinggal individunya, sama halnya juga dengan organisasi atau lembaga lainnya.¹⁰⁵

2. Bentuk –Relasi Kuasa antara Kiai di Pondok Pesanten Raudhatul Ulum dan PKS

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum terlihat begitu mempunyai peluang untuk kedepannya dalam dunia politik terkhususnya pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkhususnya kiai di Pesantren yang ada di pondok pesantren tersebut, karena dalam relasi ini, model politik yang diterapkan dengan model politik santun, jujur dan berakhlakulkarimah,

Menurut K.H Tol'at Wafa Ahmad Ada tiga ciri dalam kualitas berpolitik yaitu *pertama*, setiap jabatan pada dasarnya merupakan amanah dari masyarakat, *kedua*, setiap jabatan yang diberikan oleh kiai pesantren dari masyarakat harus bisa dipertanggung jawabkan dari masyarakat dan tanggung jawab dihadapan Allah, dan *ketiga*, dengan adanya relasi ini maka kegiatan yang diharapkan masyarakat harus terpenuhi guna menjaga tali persaudaran sesama umat Islam.¹⁰⁶

Sifat pertanggung jawaban harus dilakukan atau dilaksanakan guna menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat. kekuasaan adalah amanah (kepercayaan). untuk orang-orang yang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggung jawabkan

¹⁰⁵M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

¹⁰⁶Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Maelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

kepada Tuhan dan mereka yang berada dibawah kekuasaanya. Dari penjelasan diatas, ada tiga teori yang membahas tentang kekuasaan sesuai apa yang dikatakan K.H Tol'at Wafa Ahmad antara lain:

1. Teori Ketuhanan, teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan, dan Tuhan pula yang memberi kekuasaan itu kepadanya.
2. Teori Kekuatan, teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber dari kekuatan dari masyarakat kepada seseorang yang dimiliki memungkinkan kemenangan dalam persaingan, kekuasaan yang menanglah yang memimpin dan berkuasa.
3. Teori Kontrak Sosial, teori ini mengemukakan bahwa kehidupan bernegara berpangkal dari sebuah perjanjian Masyarakat.¹⁰⁷

Jika dalam kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum terpenuhi dalam tiga ciri tersebut, maka akan ada hubungan yang harmonis antara kiai Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, dan masyarakat Ogan Ilir, dalam konteks politik, peranan kiai ataupun politisi kiai Pesantren Raudhatul Ulum sangat penting dalam masyarakat, artinya dalam melakukan hubungan antara kedua ini sudah sangat diterima oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat di desa Sakatiga.

Dalam hubungan yang terjadi antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka bentuk dari relasi kuasa tersebut tidak

¹⁰⁷Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.52.

hanya dalam satu fokus saja, menurut Imam Hidayat jenis-jenis kekuasaan pada umumnya dapat dibagi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan Eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan,
2. Kekuasaan Legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan,
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.¹⁰⁸

Bentuk kekuasaan John Locke juga memberikan tiga macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, sedangkan Montesqueu mengemukakan pendapatnya yang memisahkan kekuasaan itu atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dan meletakkan kekuasaan tersebut dengan dalam kewenangan lembaga yang berbeda , karena dengan cara seperti ini lembaga- lembaga pemerintahan saling mengawasi sehingga penindasan terhadap rakyat bisa terhindari. ¹⁰⁹

Berdasarkan teori tersebut, terjadinya relasi antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, melibatkan antara kiai- kiai yang menjadi politisi di partai politik terkhususnya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan terbentuknya relasi

¹⁰⁸Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009),h. 29.

¹⁰⁹Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.75.

tersebut kekuasaan legislatif lah yang banyak berperan aktif baik itu tingkat provinsi, ataupun tingkat kabupaten, dan pengurus- pengurus politisi partai lainya yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang juga aktif menjadi politisi partai keadilan sejahtera (PKS).¹¹⁰

Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh teori Michel Faocaolt, dalam teori ini Michael Faocaolt menjelaskan tentang bentuk kekuasaan bahwa kekuasaan bukan milik siapa pun; kekuasaan ada di mana-mana; kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu -ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran-. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam.¹¹¹

Maksudnya dalam sebuah hubungan atau kerjasama tidak hanya melakukan dalam satu bentuk saja, apalagi dalam relasi ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat, tentunya bentuk interaksi sosial masyarakat sangat diperlukan dalam relasi agar terciptanya suatu kedamaian. Interaksi sosial pun terjadi jika dua orang atau lebih saling berhadapan, bekerja sama, berbicara, berjabat tangan dan sebagainya.

Sama halnya dengan bentuk kekuasaan kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam hal ini penulis mewawancari dengan

¹¹⁰Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Maelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

¹¹¹Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik" Vol. 18, No. 1, (Januari 2013),h..80.

berbagai elit Pesantren dan elit Partai Politik yang secara langsung melakukan relasi antara kedua lembaga tersebut. Dengan ini penulis mewawancarai dengan K.H Abdul Karim Umar di gedung Administrasi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, beliau mengatakan bahwa bentuk relasi antara keduanya ini biasa-biasa saja, namun dalam kerja sama yang dilakukan oleh kiai-kiai yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, banyak kegiatan yang telah dilakukan salah satunya kegiatan yang bersifat sosial yang juga melibatkan masyarakat desa Sakatiga.¹¹²

Sedangkan menurut K.H Tol'at Wafa Ahmad menjelaskan bahwasanya bentuk relasi yang dilakukan antara keduanya tidak hanya dalam bentuk politik saja namun terjalinya relasi ini lebih memfokuskan pada dakwah sosial masyarakat dan sosial politik yang memberikan pandangan politik baik, di dalam masyarakat terkhususnya di Ogan Iilir, begitu pula dengan partai keadilan sejahtera (PKS) yang selalu memberikan akhlakulkarimah kepada masyarakat sehingga dengan adanya relasi ini terjalin harmonis antara Pondok Pesantren, dan Masyarakat.¹¹³ Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh M. Dewan Rahardjo bahwa kiai pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan saja, namun pesantren dikategorikan sebagai makhluk

¹¹²Abdul Karim Umar, (Wakil Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 10 Februari 2017.

¹¹³Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

sosial, karena pada dasarnya kiai pesantren mampu dan sanggup dalam memberikan perubahan sosial terhadap masyarakat.¹¹⁴

Dari pendapat diatas bahwa bentuk hubungan atau kerjasama ini lebih memfokuskan pada dakwah sosial masyarakat dan sosial politik, keduanya melakukan kegiatan guna tercapainya kerukunan masyarakat, contohnya pada bulan Mei 2016 Perwakilan Dpw Pks Sumsel Mensosialisasikan tentang Ziswaf (*Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf*) dan mengadakan pertemuan di Aula Darul Arqam di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum desa Sakatiga Indralaya, dalam sosialisasi ini dijelaskan oleh ketua DPW Partai keadilan sejahtera (PKS) Aksweni, bahwasanya sosialisasi ini dimaksudkan untuk demi kelangsungan dan kepentingan umat Islam terkhususnya masyarakat di ogan ilir.¹¹⁵

Bentuk hubungan dalam kiai pesantren Raudhatul Ulum lainnya yaitu ustad Dakir Sukaryo sebagai politisi PKS juga pernah menjalankan sosialisasi yaitu dengan mengadakan kampanye simpatik dengan tema (*PKS putihkan Indralaya #ogan ilir pilih PKS*) yang dilaksanakan pada 28 maret 2014 di lapangan sepakbola torpedo Indralaya. Dalam kampanye tersebut Dakir Sukaryo sebagai instruktur dan mengajak masyarakat ogan ilir untuk mengikuti kampanye tersebut, dan dalam kampanye tersebut juga banyak hadiah diantara bagi yang beruntung ingin diberikan sembako, pakaian murah, pelayanan kesehatan gratis, bazar, dan doorprize jutaan rupiah.

¹¹⁴Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3S, 1985), hal. 20.

¹¹⁵Situs Resmi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, diakses pada 10 Januari 2017. [Http://ppru.ac.id](http://ppru.ac.id)

Kemudian bentuk hubungan lainnya dalam dalam pesantren yaitu santri santri di pondok pesantren Raudhatul ulum diajarkan bagaimana cara berpolitik yaitu dengan mengadakan kunjungan. Kunjungan ini merupakan salah satu agenda rutin dari Program Edukatif yang dicanangkan oleh pengurus SMP-IT Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. Dalam kunjungan ini bertemakan tentang *(Satu Hari Menjadi Anggota Dewan Legislatif)* Pada kesempatan ini yang dipandu langsung oleh Ahmad Yani para santri/wati diajak tur keliling kantor DPRD Kab. Ogan Ilir, dalam dialog bersama Santri/wati PPRU, Beliau dengan sangat bersemangat menjelaskan tentang apa saja yang menjadi tugas-tugas dari anggota dewan, bagaimana peran Perangkat DPRD (Legislatif) bekerjasama dengan Pemerintah (Eksekutif) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Begitu juga dengan Najib Sukhie, beliau mengatakan bahwa relasi antara keduanya ini dibentuk karena adanya kesamaan idologi yang sama-sama bertujuan untuk membantu dan mengajarkan masyarakat untuk berpolitik yang bernuansa akhlakulkarimah. Dengan adanya kesamaan ini maka kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dapat memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan semua itu karena demi keselamatan umat Islam., dan antara kedua lembaga dan masyarakat saling mempercayai satu sama lain karena

dalam sebuah hubungan tingkat keyakinan sangat diperlukan guna tercapainya suatu kedamaian¹¹⁶

Menurut Miriam Budiharjo, keabsahan (legitimasi) adalah keyakinan keyakinan anggota- anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang dituju kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa peyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedur yang sah. Hal ini berarti keabsahan kekuasaan politik tergantung pada dua faktor yaitu pengakuan objek kekuasaan dari masyarakat dan aturan- aturan hukum yang sah.¹¹⁷

Selanjutnya penulis juga mewawancarai bapak M.Ridho dirumahnya beliau mengatakan bahwa bentuk relasi yang dilakukan oleh keduanya ini semata –mata hanya demi keselamatan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa politik identik dengan makna pronfal, maka dari itu tindakan kiai pesantren dalam berpoltik ingin memberikan dan menunjukan kepada masyarakat untuk memberikan arah yang jelas bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai fenomena politik di tingkat daerah

¹¹⁶ Nadjib Subkie (Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 06 April 2017.

¹¹⁷Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.59.

yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tentunya, dengan kerjasama ini masyarakat harus lebih cerdas terhadap fenomena politik tersebut.¹¹⁸

Dari argumen di atas peneliti menyimpulkan bahwa, melalui sosialisasi politik, masyarakat akan mengenali suatu sistem politiknya yang berlaku di sekitarnya sehingga masyarakat diberikan reaksi terhadap gejala-gejala dari sistem politik itu, disini masyarakat akan mengetahui proses politik yang diberikan oleh kiai-kiai pesantren. pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari proses politik di Indonesia akan dapat diikuti tahapan-tahapan dengan baik apabila masyarakat telah mengenali pemilu dengan baik yang sangat berguna bagi masyarakat yaitu mengenali, dan bagi proses politik telah memiliki ruang untuk dikenali masyarakat sehingga proses politik tidak canggung untuk disosialisasikan oleh masyarakat desa Sakatiga.

3. Efektivitas Relasi Kuasa Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih mengacu pada output yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan.

¹¹⁸M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

Kiai Pondok pesantren Rraudhatul Ulum telah lama menjalin hubungan dengan PKS, yang mana dalam hubungan tersebut setidaknya terdapat efektivitas, baik itu efektivitas Pesantren, partai Politik maupun pada Masyarakat itu sendiri :

A. Efektivitas Pesantren

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.¹¹⁹ Pesantren yang merupakan pondok sejarah yang telah berdialog dengan zamanya masing-masing yang memiliki karakteristik berlainan baik menyangkit sosio-politik, sosio-cultural, sosio-ekonomi maupun sosio religius, antara pesantren dan masyarakat sekitar, terkhususnya masyarakat desa, telah terjalin interaksi yang harmonis, bahkan keterlibatan mereka cukup besar dalam mendirikan pesantren.¹²⁰

Terjadinya Relasi ini tentunya tidak pernah jauh dari efektivitas, terkhususnya efektivitas di Pesantren Itu Sendiri yang Menotabankan Kiai-Kiai yang ada di Pondok Pesantren Rraudhatul Ulum Sakatiga. Dari hasil wawancara peneliti kepada K.H Tol'at wafa Ahmad, bahwa dalam relasi ini cukup banyak efektivitas yang telah diraih, terkhususnya pada saat beliau menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan pada periode 2004-2009,

¹¹⁹Hendra Zainuddin dan Muhammad Tuwah, *Paradikma Baru Pesantren Masa Depan* (Palembang: Aulia Cendekia Press, 2012), h.6.

¹²⁰ Mujamil Qoumar, *Pesantren dari Transpormasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga), h.15.

efektifitas yang dilakukan beliau tentunya tidak menyimpang apa yang di inginkan masyarakat diantaranya :

1. Dari segi Perjuangan Jama'i, dalam perjuangan ini tidak sedikit yang telah dilakukan oleh kiai pesantren dalam melakukan pencerahan terhadap masyarakat, secara konsisten, perjuangan yang telah dilakukan oleh kiai pesantren tersebut dengan cara berdakwah, bersama kader-kader lainnya, hal ini dilakukan demi keselamatan umat Islam.

2. Dari segi Kecapaian atau Prestasi,

Selama menjadi anggota legislatif terkhususnya di bagian Komisi Pendidikan dan Kesehatan, beliau juga aktif dalam melakukan hal-hal yaang berhubungan dengan masyarakat yaitu ikut memperjuangkan perubahan, diantaranya, selama menjadi anggota legislatif K.H Tol'at wafa Ahmad juga ikut memperjuangkan sekolah gratis, ikut memperjuangkan kesehatan gratis praktisi pendidikan serta ikut menyelesaikan persoalan korupsi.

Dalam hal kedudukan K.H Tol'at wafa Ahmad aktif jadi elit pesantren sebagai Mudir di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan juga elit politisi di Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumatera selatan hal ini berdampak pada efektifitas dari kedua peranya dan efektifitas dari lembaganya, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dalam sistem pengajaranya tidak hanya yang berbentuk formal saja, melainkan ada yang non formal, hal ini Pondok Pesantren Raudhatul Ulum juga megajarkan kepada para santrinya bagaimana cara

berpolitik yang baik, berpolitik yang berakhlakulkarimaah, sehingga ada sebagian dari alumni Pesanten Raudhatul Ulum yang aktif menjadi anggota- anggota Dewan

Berbicara mengenai kedudukan, ada tiga macam kedudukan menurut ajaran Islam yaitu :

1. Kedudukan manusia sebagai Khalifah, maksudnya Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat Allah. Jabatan-jabatan duniawi, misalkan yang diberikan oleh atasan kita, ataupun yang diberikan oleh sesama manusia, adalah merupakan amanah Allah, karena merupakan penjabaran dari khalifatullah. Sebagai khalifatullah, manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada semua makhluknya.
2. Kedudukan manusia sebagai Pembangun, maksudnya pembangunan sosial yang mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan untuk mencapai kehidupan yang baik dan maju.
3. Kedudukan manusia sebagai Abdi Tuhan, maksudnya tanggung jawab manusia sebagai hamba tuhan memelihara iman yang dimilikinya.¹²¹

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan K.H Abdul Karim Umar beliau berpendapat bahwa efektifitas yang telah dihasilkan oleh kiai pesantren banyaknya pemimpin-pemimpin yang telah berhasil menjadi anggota terkhususnya anggota dewan legislatif, dengan adanya efektifitas hubungan ini maka kiai-kiai yang ada

¹²¹Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.107-114.

di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bisa mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran.¹²²

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan kiai Najib Subkie yang mengatakan bahwa bentuk efektifitas dari keduanya ini sama-sama saling menguntungkan, maksudnya pondok pesantren khususnya kiai-kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum bisa menyampaikan aspirasi kepada masyarakat tentang politik yang sebenarnya politik yang berakhlakulkarimah, sebagai salah satu contoh Kesuksesan pilkada pada tahun 2004 dengan terpilihnya K.H Tol'at wafa Ahmad merupakan salah satu keberhasilan yang di capai oleh Pondok Pesantren raudhatul Ulum dalam memiliki pimpinan yang sesuai dengan apa yang di inginkan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, partai Politik dan masyarakat itu sendiri.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh kiai M.Ridho bahwa efektifitas yang sudah dihasilkan oleh hubungan ini banyak kiai- kiai yang menjadi pemimpin masyarakat contohnya M. Ridho sendiri, pada periode 2009-2014 kiai M.Ridho pernah Menjadi anggota legislatif dan sikap beliau selama menjadi anggota legislatif pernah memberikan amar ma'rup kepada masyarakat, selama menjadi anggota dewan beliau berusaha untuk berdakwah dan meyakinkan kepada

¹²²Abdul Karim Umar, (Wakil Mudir Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 10 Februari 2017.

masyarakat tentang pentingnya berpolitik, Jadi kalau sudah membentuk relasi atau hubungan kerjasama itu bisa memberikan amar ma'ruf nahi munkar.¹²³

Hal yang dilakukan oleh M. Ridho selama menjadi anggota DPRD tersebut, terbukti ketika pada tahun 2010, beliau melakukan agenda *workshop* yang bertempat di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. M. Ridho dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat desa Sakatiga tentang politik yaitu dengan mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dengan bertemakan “*Sekolah Demokrasi*”. dalam tema tersebut M.Ridho menjelaskan tentang pentingnya berpolitik yang berakhlakul karimah. Bukan hanya masyarakat namun melibatkan persertanya dari berbagai unsur, baik dari unsur pondok pesantren, unsur masyarakat dan tidak kalah pentingnya dari unsur sekolah demokrasi itu sendiri”.¹²⁴

Dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes memandang bahwa penguasa adalah negara, perjanjian masyarakat pada hakikatnya adalah penyerahan kekuasaan dari warga masyarakat kepada seseorang atau sebuah lembaga yang disepakati, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan bersumber dari rakyat, dan kekuasaan tersebut mendapat legitimasi melalui perjanjian masyarakat¹²⁵

¹²³M. Ridho, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

¹²⁴M. Ridho, *Wawancara*, 5 April 2017.

¹²⁵Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.69.

B. Efektivitas Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki Ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.¹²⁶ Menurut Nadjib Subkie Dalam terjadinya relasi ini tentunya Efektifitas yang diperoleh teradap Partai Politik terkhususnya PKS bukan hanya bentuk silaturahmi saja melainkan partai politik tersebut bisa mendapatkan atau memperoleh anggota partai dan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat.¹²⁷ Efektifitas dari partai politik itu maksudnya hasil dari yang diperoleh partai dalam menjalankan relasi atau kerja sama dengan lembaga lain.

Berbicara mengenai relasi, PKS adalah salah satu partai Islam yang mempunyai relasi dengan kiai pondok Pesantren Raudhatul Ulum, dengan ini tentunya ada efektifitas yang diperoleh. Menurut Tol'at Wafa Ahmad dalam kutipanya menjelaskan dari orgaisasinya atau dari partai politiknya terkhususnya PKS, dengan adanya relasi ini maka efektifitas yang didapat yaitu bisa menjalin silaturahmi antar sesama, karena kembali lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

¹²⁶Syafe'i Ibnu Syafe'idan Azhari. *Sistem Politik Indonesia, Era Soekarno, Hatta, Syahril, Aidit, Syafurudin. Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie. Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamsa Haz. Era SBY, Kalla, Baasyir* (Bandung: Rafika Aditama). h. 45.

¹²⁷Nadjib Subkie (Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum), *Wawancara*, 06 April 2017.

terkhususnya kader- kader yang ada dipartai tersebut anggotanya dilakukan dengan cara dicalonkan, bukan mencalonkan.¹²⁸

Menurut *M. Ridho* sama halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam kehidupannya berusaha mencari pemimpin melalui Pondok Pesantren yang juga berbasiskan agama Islam. Karena seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera adalah partai basis Islam yang mencari anggota – anggotanya dengan cara dicalonkan bukan mencalonkan hal inilah yang menjadi tujuan dari masing-masing relasi dengan apa yang menjadi peran dari pesantren dan apa yang diinginkan oleh partai politik.¹²⁹

Dari hasil kutipan wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas yang didapat dari keduanya terkhususnya pada PKS dari satu sisi terdapat hubungan yang harmonis yaitu dapat bersilaturahmi antar lembaga, bisa menyatuhkan dalam persamaan pandangan dan sama- sama berhasil mendapatkan pemimpin yang berakhlakulkarimah, namun disisi lain peranan kiai dalam aktif menjadi politisi partai menjadi peluang dalam mensosialisasikan partainya hal ini disebabkan karena kiai orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat, karena apapun yang dikatakan oleh kiai masyarakat akan mengikutintya.

¹²⁸Tol'at Wafa Ahmad, (Mudir PPRU dan Ketua Maelis Pertimbangan Wilayah di DPW PKS Sumsel), *Wawancara*, 13 Maret 2017.

¹²⁹*M. Ridho*, (Pengurus DPD PKS Ogan Ilir Bidang Organisasi dan Dakwah), *Wawancara*, 5 April 2017.

C. Efektivitas Masyarakat

Menurut Koenjaraningrat masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya bersinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹³⁰ Secara tradisional masyarakat memandang pesantren sebagai sumber legitimasi moral. Kiai dan pesantren adalah panutan serta pembimbing umat sebagai sumber moral dan panutan umat pesantren diharapkan menjadi teladan dalam mempraktekan Islam dalam perilaku sehari-hari oleh karena itu, kiai dan komunitas pesantren tentu harus menjada diri dari nilai-nilai yang akan merusak kewibawaan dan integritas.

Sejauh ini, ada beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap keterlibatan politik pesantren. *pertama*, masyarakat menilai pesantren yang terlalu politis akan bercerabut dari fungsi-fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam. *kedua*, resistensi yang paling nyata tentu pembangkangan politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak memiih partai yang didukung secara khusus oleh pesantren.¹³¹ Menurut kiai Abdul Karim Umar, saat diwawancarai dalam petikan wawancaranya beliau menyatakan efektivitas yang dihasilkan oleh relasi ini adalah telah mencerdaskan masyarakat desa Sakatiga Ogan Ilir terhadap politik agar masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bangsa dan bernegara

¹³⁰Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka: 2009), h. 122.

¹³¹Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “ *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik : Study Kasus Pondok Pesantren Al- Munawir, Krapyak, Yogyakarta V*, No.2 (2010).h.218-219.

supaya tidak dibodohi oleh politik itu sendiri. Dengan adanya relasi ini maka masyarakat tau dalam pentingnya hak dan kewajiban dalam berpolitik.¹³²

Hal ini berbeda dengan apa yang diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Sakatiga bapak Mukhlis Mansyur mengenai pola pikir masyarakat tentang politik hal yang harus diketahui, bapak Mukhlis Mansyur adalah mantan guru / pengurus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga pada tahun 1987 sampai 2005 beliau mengatakan bahwa kiai yang terjun ke politik dan berhasil meraih jabatan politik dianggap telah mulai meninggalkan kepentingan masyarakat dan jauh dari kehidupan masyarakat maka dari itu masyarakat harus benar-benar paham tentang pengetahuan politik dan meleak politik karena dalam relasi ini tidak ada efektifitas yang diperoleh masyarakat.¹³³

Di mata masyarakat, keterlibatan kiai dalam berpolitik kekuasaan cenderung diterjemahkan sebagai salah satu bentuk kecintaan kiai pada kekuasaan sehingga menafikan citra kesucian dirinya sendiri. Masyarakat pada awalnya sangat mengagumi dan menghormati kiai, perubahan haluan mengambil jarak dengan kiai yang bersangkutan. Selain telah dianggap tidak lagi mencerinkan citra pengayom masyarakat, ia juga telah terjebak dengan kepentingan duniawi, masyarakat tidak lagi menganggapnya sosok yang berwibawa sehingga setiap kata-katanya tidak lagi dianggap sebagai patuah suci lantaran telah tercampur dengan

¹³²Abdul Karim Umar (Najib Mudir Pondok Pesantren Radhatul Ulum Sakatiga), *Wawancara*, 27 Februari 2017.

¹³³Mukhlis Mansyur (Tokoh Masyarakat desa Sakatiga Ogan Ilir), *Wawancara*, 27 Februari 2017.

politik praktis.¹³⁴ Apa yang dijelaskan teori ini, dialami oleh PKS pada saat pemilihan legislatif kabupaten Ogan Ilir 2014, dalam pemilihan tersebut Drs. Dakir Sokaryo, Muhammad Ridho, S.Ag. daerah pemilihan Ogan Ilir 1 dan Husnul Anam, S.HI. Daerah pemilihan Ogan Ilir 2 telah gagal dalam mencalonkan anggota legislatif tahun 2014. Untuk lebih jelasnya lihat data berikut :

TABEL 4
REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM
PEMILU ANGGOTA DPR KABUPATEN / KOTA TAHUN 2014
KABUPATEN OGAN ILIR SUMATRA SELATAN.

No	Partai Politik	Perolehan Kursi				Jumlah Kursi
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1	Partai Nasdem	1	2	2	1	6
2	PKB	-	-	-	1	1
3	PKS	-	-	-	-	0
4	PDI Perjuangan	1	1	2	-	4
5	Golkar	2	2	2	-	6
6	Gerindra	1	-	1	1	3
7	Demokrat	1	-	1	1	3
8	PAN	1	1	2	1	5
9	PPP	1	1	1	1	4
10	Hanura	-	-	-	1	1
11	PBB	1	-	-	-	1
12	PKPI	-	-	-	-	0
Jumlah		9	7	11	7	34

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir. 25 Maret 2017 pukul 10:00 Wib

Dari hasil rekapitulasi perolehan kursi tahun 2014 dijelaskan bahwa hasil perolehan kursi partai terbanyak diduduki oleh partai Nasdem dan Golkar dengan

¹³⁴Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* (Jogjakarta : Ircisode, 2009), h. 132.

jumlah kursi 6, sedangkan PKS dan PPKI tidak ada satupun kursi yang diperoleh. PKS adalah salah satu partai Islam yang punya hubungan dengan kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum. Menurut Bapak Mukhlis Mansyur hal yang melatarbelakangi terjadinya penurunan tersebut dikarenakan kiai sudah gagal dalam merekrutmen atau mengajak masyarakat Ogan Ilir untuk mendukung dirinya, hal ini membuat masyarakat paham akan melek politik.¹³⁵ Menurut Bolland bahwa masyarakat muslim tradisional selalu mendukung sikap politik yang dianut oleh tokoh Agama atau Pesantren. Seperti halnya masyarakat Desa Sakatiga yang dulunya mendukung kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dalam menjabat politik dan pada pemilihan legislatif tahun 2014 tidak ada yang memenangkan, namun hubungan relasi antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap terjalin hingga sekarang.

¹³⁵Muklis Mansyur (Tokoh Masyarakat Desa Sakatiga), *Wawancara*, 22 November 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan tentang relasi kiai di pondok pesantren dan partai politik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Adanya relasi kuasa antara kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan PKS disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya persamaan pandangan yaitu Kiai di Pondok Pesantren dan PKS sama-sama berideologi Islam, persamaan kekeluargaan antara K.H Tol'at Wafa Ahmad Mudir di pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Muhammad Iqbal Ramzi sebagai anggota DPR RI masih ada ikatan keluarga yaitu keduanya bermisanan, kemudian dari pandangan kekerabatan antara K.H Tol'at Wafa Ahmad dan Hidayat Nur Wahid mereka satu almamater di Pesantren Gontor. Bentuk relasi yang dilakukan antara kedua ini yaitu memberikan arahan tentang pandangan politik baik kepada masyarakat Ogan Ilir, baik itu dalam bentuk kampanye maupun dalam bentuk dakwah sosial masyarakat.

Efektifitas yang telah dilakukan dalam relasi keduanya ini antara lain : Efektifitas dari Kiai Pondok pesantren, banyaknya pemimpin- pemimpin yang memperoleh jabatan politik. Eektifitas dari partai, yaitu Eektifitas dari partai, yaitu menjalin tali silaturahmi kepada kiai di pondok pesantren dan masyarakat Ogan Lilir untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang berakhlakul karimah , selain itu peranan kiai Pesantren yang aktif menjadi politisi Partai menjadi peluang untuk mensosialisasikan partainya hal ini disebabkan

karena kiai orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Efektifitas Masyarakat, terjadi pergeseran politik pada pemilihan legislatif 2014. Hal ini disebabkan karena kiai sudah gagal dalam merekrutmen atau mengajak masyarakat Ogan Ilir untuk mendukung dirinya, hal ini disebabkan karena masyarakat paham akan melek politik.

B. Saran-saran

Kiai pesantren adalah orang yang mempunyai gelar yang diberikan kepada masyarakat tanpa diminta kepada orang yang bersangkutan, maka dari itu keberadaan kiai pesantren yang terjun ke dunia politik harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat khususnya pada masyarakat desa Sakatiga Ogan Ilir. Kiai hendaknya tidak terlalu larut dalam kegiatan politik praktis, lebih meningkatkan peranannya dalam membimbing masyarakat. Selain itu kiai di Pondok Pesantren juga harus bisa dalam menjalankan peran ganda dengan semaksimal mungkin, baik itu di pondok pesantren dan di partai politik, dan yang terpenting kepada masyarakat terkhususnya Masyarakat Sakatiga Ogan Ilir Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta :Rineka Cipta,1998.

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali press, 2012.

Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan, Islam dan Umum*,Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3S, 1985.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama*,Yogyakarta: LkiS, 2003.

Firmanzah H.D., *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta,Pustaka, 2010.

Hajar, Ibnu. *Kiai ditengah Pusaran Politik antara Petaka dan Kuasa* Jogjakarta : Ircisode, 2009.

Hafidudin,Didin. *Dakwah Actual*,Jakarta :Gema, 1998.

Hidajat ,Imam. *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA Press, 2009.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

M. Masyhud Solthon dan Khusnurdilo Moh, *Menejemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

Madjid, Nurcholish. *Tradisi Islam :Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta :Pramadina, 1997.

Marbun, *Kamus Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Bandung: PT Remaja Rosdakaya,2012.
- Nawawi.H.,*Metode Penelitian Bidang Sosial*,Yogyakarta: Gaja Mada University press,1995.
- Qomar, Mujamil. *Pesantreen dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* Jakarta:Erlangga.
- Qodir, Zuly.*Sosiologi Politik Islam Kontentasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia* ,Yogyakarta, Pustaka, 2012.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka,2007.
- Zainuddin, Hendra dan Tuwah, Muhammad. *Paradigma Baru Pesantren Masa Depan* Palembang:Aulia Cendekia Press,2012.
- Zini ,Abdul Wahid. *Moralitas Pendidikan Pesantren* Yogyakarta:Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia,1996.
- Rahardjo M.Dewan, *Pesantren dan Pembaharuan*. Dalam Skripsi Nopiyan , Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan SKI. Judul : *peran pesantren dalam merehabilitasi korban penyalagunaan narkoba, kajian terhadap pondok pesantren Ar-rahman plaju darat palembang tahun 2006-2010* 2015.
- Setiadi, Eli M Dan Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi Politik*,Jakarta, Kencana,2013.

Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik*, Malang : Uin-Press, 2007.

Santoso, Listiyono. *Teologi Politik Gusdur*, Yogyakarta: Ar –Ruzz Media, 2004).h.134

Syafe'i Syafe'i Ibnu Dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia, Era Soekarno, Hatta, Syahril, Aidit, Syafurudin. Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie. Era Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Hamsa Haz. Era SBY, Kalla, Baasyir*, Bandung: Rafika Aditama.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali pers, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* Bandung Alfabeta, 2013.

Santoso, Gempur. *Fundamental Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Jurnal :

Abdil Mughis Mudhoffir, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik” V 18, No, 1 Januari 2013 pukul 20:45 Wib.
https://www.researchgate.net/.../318244419_Teori_Kekuasaa...

Abdullah Khozim Af, “Konsep Kekuasaan Michel Faucault” Vol.2, No1, Juni 2012.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/3/Chapter%20II.pdf>

Aulia Harridhi Khilal, "*Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*", artikel dari http://kompasiana.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian-kualitatif_5500cd76ea8341e158b4581.

A. Khozim Afandi, "*Konsep Kekuasaan Menurut Michael Foucault*" V, No, 01, 2 Desember 2011. <file:///C:/Users/7/AppData/Local/Temp/82-1-304-1-10-20151016.pdf>

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD-ART)Bab II pasal 5 dan 6Partai Keadilan Sejahterah(PKS).

Dokumen diperoleh dari *Humas Pondok Pesantren Raudhatul Ulum*,

Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpula dan Analisis Data Kualitatif", artikel diakses pada 05 Januari 2017 pukul 09:00 WIB dari <http://ivanovichagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>.

Jeny Chomaria, "Pengolahan dan Analisis Data", artikel diakses pada 30 Desember 2016 pukul 10:30 WIB, dari http://pengolahan-dan-analisis-data.blogspot.co.id/2013/pengolahan-dan-analisis-data_3.html

Kaizal Bay, "*Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*" V, No. Xvii 1 januari 2011.

Nawawi, "Sejarah dan Perkembangan Pesantren", Vol.4, No.1, 14 Januari- 19 Juni 2006.<https://Suberia.Wordpress.Com/2010/06/20/Peraturan-Pemerintah-No-552007/>

Suci Sundusiah, "Analisis Data Kualitatif" diakses pada 21 Oktober 2016 pukul 10:WIB dari http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR_PEND_BHS_DAN_SASTRA_INDONESIA/SUCI_SINDSIAH/artikel_ilmiah/analisis_data_kualitatif.pdf.

Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "*Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik : Study Kasus Pondok Pesantren Al- Munawir, Krapyak, Yogyakarta*" V, No.2 2010. <https://media.neliti.com/.../37094-ID-dampak-keterlibatan-pesantren-dalam-politik-stu...>

Situs Resmi Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. <http://ppru.ac.id/>.